

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman maka perlu kiranya dijelaskan tujuan dari penelitian yang ada dalam judul skripsi: **“Kepemimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Pengelolaan Zakat, infak, Sadaqah (Studi Pada BAZNAS Provinsi Lampung)”** . Dengan demikian akan diperoleh gambaran yang jelas sesuai dengan yang dimaksud oleh penulis. Adapun penjelasan tujuan dalam judul tersebut adalah sebagai berikut:

Kepemimpinan menurut Stoner dapat didefinisikan sebagai suatu proses pengarahan dan pemberian pengaruh pada kegiatan-kegiatan dari sekelompok anggota yang saling berhubungan tugasnya.¹ Sedangkan menurut Charles J. Keating, kepemimpinan merupakan suatu proses dengan berbagai cara mempengaruhi orang atau sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan bersama.²

¹ Hani Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta : Bpfe-Yogyakarta, cet ke-20. 2009) h. 294.

² Carles. J. Keating, *kepemimpinan, teori dan pengembangan*, alih bahasa A.M, Mangunhardjana, (Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 1986) h.9.

Kepemimpinan yang di maksud dalam judul ini adalah suatu proses pengarahan dan pemberian pengaruh pada orang atau kelompok yang di lakukan oleh pimpinan BAZNAS untuk mencapai tujuan bersama, dalam hal ini adalah kepemimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Lampung.

Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya di sebut BAZNAS adalah lembaga yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat secara Nasional³. BAZNAS Provinsi adalah lembaga yang berwenang melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat Provinsi⁴.

BAZNAS yang di maksud dalam judul ini adalah BAZNAS Provinsi yang beralamat di jalan Cut Mutia No. 23 Teluk Betung. Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.

Pengelolaan Menurut Soekanto adalah suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak sampai dengan proses terwujudnya tujuan.⁵ Sedangkan Pengertian Pengelolaan menurut Moekijat merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, petunjuk, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.

³Peraturan badan amil zakat nasional nomor 1 tahun 2014, bab 1, pasal , ayat 1.

⁴ Ibid, bab 1, pasal 1, ayat 2.

⁵ Rahardjo Adisasmita, 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yang Menerbitkan Graha Ilmu : Yogyakarta.

Pengelolaan yang di maksud dalam judul ini adalah suatu proses perencanaan, petunjuk, pengaturan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan sampai dengan proses terwujudnya tujuan, dalam hal ini adalah pengelolaan Zakat, infak, sadaqah pada BAZNAS Provinsi Lampung.

Zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula⁶. Pengertian Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk dipergunakan kepentingan orang banyak⁷. shadaqah adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir, orang yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima shadaqah, tanpa disertai imbalan⁸.

Zakat, infak, sadaqah (ZIS) yang di maksud dalam judul ini adalah sejumlah harta yang di keluarkan untuk di pergunakan kepentingan orang banyak tanpa di sertai imbalan. Dalam hal ini adalah dana zakat, infak, shadaqoh (ZIS) yang di kelola oleh BAZNAS Provinsi Lampung.

⁶ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002, h. 7.

⁷ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*. Penerbit PT Raja Grafindo Persada : Jakarta. 2007.h 23

⁸ Yunus, Mahmud. *Al Fiqhul Wadhih Juz II*. Maktabah As Sa'diyah Putra. Padang. 1936. h. 33.

Jadi yang di maksud dengan judul “Kepemimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Pengelolaan Zakat, infak, Shadaqah” yaitu Bagaimana gaya Kepemimpinan yang di terapkan BAZNAS Provinsi Lampung dalam pengelolaan dana Zakat, Infak, Shadaqoh dan Bagaimana Strategi yang di gunakan BAZNAS Provinsi Lampung dalam pengelolaan dana ZIS.

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa hal yang melatar belakangi dipilihnya judul dalam penelitian ini, antara lain :

1. Peneliti menilai pimpinan BAZNAS Provinsi Lampung berhasil dalam mengelola dana ZIS di BAZNAS Provinsi Lampung dengan efektif
2. Penelitian ini sangat relevan dengan disiplin ilmu yang penulis peroleh di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Jurusan Manajemen Dakwah (MD) serta dapat menjadi sumbangan keilmuan Manajemen bagi Prodi Manajemen Dakwah terutama dalam segi Ilmu Kepemimpinan dan pengelolaan Zakat, Infak, Sadaqah

C. Latar Belakang Masalah

Badan Amil Zakat, infak, sadaqah adalah organisasi pengolaan zakat yang di bentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur

masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Lampung adalah lembaga yang bergerak dalam proses pengelolaan zakat baik dari proses pengumpulan hingga proses pendistribusian zakat yang ada di wilayah Provinsi Lampung.

Dalam bahasa Indonesia pemimpin sering disebut penghulu, pemuka, pelopor, pembina, panutan, pembimbing, pengurus, penggerak, ketua, kepala, penuntun, raja, tua-tua, dan sebagainya. Sedangkan menurut istilah pemimpin adalah orang yang mempunyai wewenang dalam pengambilan keputusan suatu organisasi. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktivitas-aktivitas sebuah kelompok yang diorganisasi ke arah pencapaian tujuan⁹. Dalam pengertian lain kepemimpinan adalah kemampuan dan keterampilan seseorang yang menduduki jabatan sebagai pimpinan satuan kerja untuk mempengaruhi orang lain, terutama bawahannya, untuk berfikir dan bertindak sedemikian rupa sehingga melalui perilaku yang positif ia memberikan sumbangan nyata dalam pencapaian tujuan organisasi.

Gitosudarmo dan Sudita mengartikan bahwa kepemimpinan merupakan faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi prestasi organisasi, karena kepemimpinan merupakan aktivitas yang utama, untuk

⁹ Pudjo Sumedi, Organisasi dan Kepemimpinan, (Jakarta, Uhamka Press. 2010). h.67

dicapainya tujuan organisasi.¹⁰ Dari pengertian ini kepemimpinan didefinisikan sebagai salah satu gaya mempengaruhi aktivitas dari individu atau kelompok untuk mencapai tujuan dalam situasi tertentu.

Dari definisi ini, nampak bahwa kepemimpinan adalah suatu proses, bahwa orang yang meliputi faktor pemimpin pengikut dan faktor situasi untuk menghasilkan prestasi dan kepuasan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kusnadi dkk bahwa : kepemimpinan adalah sebagai tindakan atau upaya untuk memotivasi atau mempengaruhi orang lain agar mau bekerja atau bertindak ke arah pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan atau kepemimpinan merupakan tindakan membuat sesuatu menjadi kenyataan.¹¹

Suatu organisasi akan berhasil atau bahkan gagal sebagian besar ditentukan oleh kepemimpinan.¹² Kepemimpinan kadangkala diartikan sebagai pelaksanaan otoritas dan pembuatan keputusan. Untuk itu diperlukan adanya strategi untuk menjalankan tugas kepemimpinan. Dalam rangka memberikan ulasan tentang strategi kepemimpinan yang efektif, pemimpin haruslah merumuskan strategi yang akan di gunakan dalam rangka mencapai tujuan organisasi,

¹⁰Gitosudarmo Indriyo & I Nyoman Sudita. *Perilaku Keorganisasian.*(Yogyakarta : BPF2000).h.127.

¹¹ Kusnadi dkk. *Pengantar Manajemen (Konseptual & Perilaku).* (Malang : Univeritas Brawijaya2005).h. 354.

¹² Anoraga Pandji.. *Psikologi Kepemimpinan.*(Jakarta : Rineka Cipta.2001). h 45.

mengelola sumberdaya yang ada agar tujuan organisasi itu tercapai sesuai dengan rencana organisasi.

Untuk memfokuskan penelitian, maka BAZNAS Provinsi Lampung dipilih sebagai subyek penelitian karena BAZNAS Provinsi Lampung adalah Badan Amil Zakat yang memfokuskan mengelola ZIS yang ada di Lampung yang mempunyai tujuan global mengentaskan kemiskinan dan mensejahterkan umat, maka faktor pendukung mendasari sebuah Badan Amil Zakat Nasional harus mempunyai sosok pemimpin tepat sesuai dengan Visi, Misi BAZNAS yang mana pemimpin mampu mengelola ZIS sesuai dengan harapan organisasi. Sebagaimana yang dilakukan oleh pimpinan BAZNAS Provinsi Lampung yang mampu menjalankan roda organisasi yang jauh lebih maju dari sebelumnya dalam pengelolaan ZIS yang mana dalam tahun pertama kepemimpinan organisasi di bentuk mampu membawa kemajuan yang signifikan di lihat dari penerimaan ZIS yang berhasil di kumpulkan yang mencapai 1.2 milyar naik lebih dari 120% dari pengumpulan dana ZIS sebelumnya yang hanya mencapai kurang lebih 425 juta pertahun, dana ZIS juga terus meningkat pada tahun selanjutnya yang pada pertengahan tahun kedua kepemimpinan berjalan sudah mencapai 1,4 milyar rupiah

Maka yang menjadi objek peneliti adalah bagaimana gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh BAZNAS Provinsi Lampung dalam mengelola ZIS sehingga dinilai berhasil dalam pengelolaan ZIS,

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, peneliti terdorong untuk mengetahui tipe kepemimpinan yang di terapkan BAZNAS Provinsi Lampung dan Strategi yang di gunakan dalam mengelola ZIS di Badan Amil Zakat Nasionalna (BAZNAS) Provinsi Lampung.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana gaya Kepemimpinan yang di terapkan BAZNAS Lampung dalam pengelolaan ZIS
2. Bagaimana Strategi yang di gunakan BAZNAS Provinsi Lampung dalam pengelolaan ZIS

E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui gaya Kepemimpinan yang di terapkan BAZNAS Lampung dalam pengelolaan ZIS
 - b. Mengetahui Strategi yang di gunakan BAZNAS Provinsi Lampung dalam pengelolaan ZIS
2. Kegunaan penelitian
 - a. Hasil studi diharapkan dapat dijadikan salah satu sumbangan pemikiran untuk memperkaya khazanah keilmuan kepemimpinan pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi pada umumnya dan

prodi Manajemen Dakwah pada khususnya.

- b. Sebagai sumbangan pemikiran dan pertimbangan bagi para pimpinan BAZNAS provinsi Lampung dalam meningkatkan fungsi kepemimpinan dan pengelaan ZIS pada Lembaga Pengelola Zakat

F. Metode Penelitian

Metodologi adalah cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data, yang dikembangkan untuk memperoleh pengetahuan dengan menggunakan prosedur yang terpercaya, dan kemudian dikembangkan secara sistematis sebagai suatu rencana untuk menghasilkan data tentang masalah penelitian tertentu”.¹³

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan oleh peneliti untuk menemukan, mengumpulkan, mengembangkan, dan mengkaji kebenaran suatu penelitian dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jadi dalam penelitian ini penulis hanya menjelaskan atau menggambarkan variabel yang ada, semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwa tanpa membuat suatu perbandingan dengan variabel yang lain.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini digolongkan kepada jenis penelitian lapangan yaitu

¹³Ibnu Hadjar. *Dasar-dasar Metodolgi Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan*.Cetakan. 2. (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada. 1999).h. 10

suatu penelitian yang dilakukan dengan sistematis dan mendalam dengan mengangkat data yang ada di lapangan.¹⁴ Penelitian ini dilakukan di BAZNAS Provinsi Lampung

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yang menurut Whitney penelitian deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang dengan tujuan untuk memberikan deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, aktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara antara fenomena yang diselidiki.¹⁵

2. Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan unit analisis yang akan di selidiki karakteristiknya.¹⁶ Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi atau studi populasi.¹⁷ Sedangkan menurut Sugiyono pengertian populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

¹⁴ Suharsimi Arikunto. *Dasar-dasar Research*. (Bandung : Tarsito. 1995). h. 58

¹⁵ Muhammad Nadzir. *Metode Penelitian*. (Jakarta : Ghalia Indonesia. 1998). h. 14

¹⁶ Kholidi, *Metode Penelitian*, (Bandar Lampung : Fakultas Dakwah IAIN RIL. 2009) h. 62.

¹⁷ Sabar Rutoto. *Pengantar Metodologi Penelitian*. (Kudus : FKIP: Universitas Muria, 2007).h. 34

kesimpulannya.¹⁸Berdasarkan pendapat di atas, penulis menggunakan penelitian populasi

3. Metode dan tehnik Pengumpulan Data

a. Interview

Interview (wawancara) adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi,dan merupakan alat yang ampuh untuk mengungkapkan kenyataanhidup, apa yang dipakai atau dirasakan orang tentang berbagai aspek kehidupan.¹⁹

Dalam melaksanakan tehnik interview, pewawancara harus mampu menciptakan hubungan yang baik sehingga informan bersedia bekerja sama dan merasa bebas berbicara serta dapat memberikan informasi yang sebenarnya. Interview yang penulis gunakan adalah interview terpimpin yaitu, Wawancara ini disebut juga dengan wawancara terstruktur. Wawancara jenis ini biasanya menggunakan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya baik oleh pewawancara maupun narasumbernya²⁰ Metode ini penulis gunakan sebagai metode pokok untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan serta informasi yang

¹⁸Sugiyono.*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* (Bandung : CV. Afabeta, 2011). h. 60

¹⁹S. Nasution. *Metode Research.* (Jakarta : Bumi Aksara, 2004).h. 113

²⁰ Muhammad, *Metodologi Penelitian ekonomi Islam,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h.34

berkaitan dengan kepemimpinan bazda dalam pendistribusian zakat pada Bazda Lampung.

b. Observasi

Metode observasi adalah suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis, dengan prosedur terstandar.²¹ Selain itu juga observasi dapat diartikan sebagai suatu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.²²

Jadi observasi dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis tentang objek penelitian, pengamatan, dan pencatatan yang harus dilakukan dengan cermat dan kritis agar tidak satupun yang terlepas dari pengamatan. Dalam hal ini penulis mengamati langsung untuk mengetahui kepemimpinan BAZNAS Provinsi Lampung

c. Dokumentasi

Data dalam penelitian kualitatif, selain bersumber dari manusia, ada pula yang bersumber bukan dari manusia diantaranya, dokumen, foto, dan bahan statistik. Dokumentasi, asal katanya dari dokumen yang artinya barang-barang tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan

²¹Sudjana. *Media Statistika*. (Bandung :Tarsito, 2005). h. 6

²²SuharsimiArikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta :Rineka Cipta, 2002). h. 120

sebagainya.²³ Dokumentasi dalam pengumpulan data ini mencakup data muzaki dan mustahik Bazda provinsi Lampung. Metode ini penulis gunakan sebagai pelengkap data untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan serta informasi yang berkaitan dengan kepemimpinan bazda dalam pendistribusian zakat pada Bazda Lampung

Jadi, penelitian ini dilakukan dengan cara mencari dokumen tentang hal-hal yang berkaitan dengan kepemimpinan dan pendistribusian zakat Bazda Lampung, kemudian data yang diperoleh dari informan yang kemudian di susun secara sistematis agar memperoleh gambaran yang sesuai dengan tujuan penelitian. Begitu pula data yang diperoleh dari informan pelengkap disusun secara sistematis agar memperoleh gambaran yang sesuai dengan tujuan penelitian.

2. Analisis Data

Analisis adalah “suatu proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dan diinterpretasikan”.²⁴ jadi yang dimaksud analisis data adalah suatu proses pengolahan data sedemikian rupa sehingga akan didapatkan suatu pemahaman atau pengertian yang seksama dalam objek yang diteliti.

²³*Ibid.* h. 158.

²⁴Masri Singaribun dan Sofian Efendi, *Op-Cit*, h.167

Dalam proses ini penelitian menggunakan metode analisis kualitatif dengan tidak menghitung atau menggunakan angka-angka. Data bermuatan kualitatif tersebut yaitu berupa catatan lapangan, rekaman kata-kata, kalimat atau paragraf (dari wawancara) atau pemaknaan penelitian dari dokumen. Untuk memperoleh data semacam ini melalui interpretasi data, digunakan analisis data deskriptif kualitatif dan penarikan kesimpulan menggunakan pendekatan deduktif.

BAB II

KEPEMIMPINAN DAN LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT

A. Kepemimpinan

1. Pengertian Kepemimpinan Dan Pentingnya Kepemimpinan Dalam Organisasi

Manusia adalah makhluk Tuhan yang paling tinggi dibanding makhluk Tuhan lainnya. Manusia di anugerahi kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan kelebihan itulah manusia seharusnya mampu mengelola lingkungan dengan baik. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia selalu berinteraksi dengan lingkungan, manusia hidup berkelompok. Hidup dalam kelompok tentulah tidak mudah. Untuk menciptakan kondisi kehidupan yang harmonis anggota kelompok haruslah saling menghormati dan menghargai. Keteraturan hidup perlu selalu dijaga. Hidup yang teratur adalah impian setiap insan. Menciptakan dan menjaga kehidupan yang harmonis adalah tugas manusia. Dengan berjiwa pemimpin manusia akan dapat mengelola diri, kelompok dan lingkungan dengan baik. Khususnya dalam penanggulangan masalah yang relative pelik dan sulit. Disinilah dituntut kearifan seorang pemimpin dalam mengambil keputusan agar

masalah dapat terselesaikan dengan baik. Dalam kenyataannya para pemimpin dapat mempengaruhi moral dan kepuasan kerja, keamanan, kualitas kehidupan kerja dan terutama tingkat prestasi suatu organisasi. Para pemimpin juga memainkan peranan penting dalam membantu kelompok, organisasi atau masyarakat untuk mencapai tujuan mereka.¹

Kepemimpinan (leadership) telah di definisikan dengan cara yang berbeda oleh orang yang berbeda pula. Menurut Stoner kepemimpinan manajerial dapat didefinisikan sebagai suatu proses pengarahan dan pemberian pengaruh pada kegiatan-kegiatan dari sekelompok anggota yang saling berhubungan tugasnya. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang kepemimpinan maka di bawah ini akan di kutip beberapa pendapat para ahli mengenai kepemimpinan. Kepemimpinan menurut Charles J. Keating kepemimpinan merupakan suatu proses dengan berbagai cara mempengaruhi orang atau sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan bersama.² Sedangkan menurut Hani Handoko kepemimpinan merupakan kemampuan yang di punyai seorang untuk

¹ <https://yunit4m411aa.wordpress.com/makalah-kepemimpinan-2/>. (Di akses 9-27-2016)

² Charles. J. Keating, *kepemimpinan, teori dan pengembangan*, alih bahasa A.M, Mangunhardjana, (Yogyakarta : Penerbit Kanisius,1986) h.9

mempengaruhi orang-orang lain agar bekerja mencapai tujuan dan sasaran.³

Kepemimpinan menurut Stagdill.V adalah proses mempengaruhi kegiatan-kegiatan kelompok yang terorganisir dengan usaha-usaha menentukan tujuan yang di capainya.⁴ Sementara itu Moh. As'ad mengemukakan bahwa kepemimpinan yang efektif sangat penting untuk kelangsungan hidup sebuah organisasi perusahaan.⁵

Dari definisi-definisi di atas dapat di simpulkan bahwa kepemimpinan merupakan suatu peran sebagai pemberi dorongan atau, mengarahkan, mengelola bawahan agar mampu mencapai sasaran yang telah di tentukan..Demikian juga dalam sebuah organisasi atau perusahaan,pengarahan terhadap usaha-usaha semua pekerja dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi.Tanpa kepemimpinan atau bimbingan,hubungan antara tujuan perseorangan atau tujuan organisasi mungkin menjadi renggang. Oleh karena itu,kepemimpinan sangat diperlukan bila suatu organisasi ingin sukses.Terlebih lagi pekerja-pekerja yang baik selalu ingin tahu bagaimana mereka dapat menyumbang dalam pencapaian tujuan organisasi,dan paling tidak,gairah pekerja memerlukan

³ Hani handoko. *Loc Cit.* h. 295

⁴ Bernadine R. Wirjana dan Susilo Subardo, *Kepemimpinan : dasar-dasar dan pengembangannya.* (Yogyakarta: Andi offset, 2006) h. 4

⁵ *Ibid.*, h. 24

kepemimpinan sebagai dasar motivasi eksternal untuk menjaga tujuan-tujuan mereka tetap harmonis dengan tujuan organisasi, maka dari itu suatu organisasi akan berhasil atau bahkan gagal sebagian besar ditentukan oleh kepemimpinan ini. Disinilah diperlukan figur kepemimpinan yang mampu berkomunikasi yang baik dan benar pada bawahannya, agar tujuan organisasi tetap terarah sesuai dengan perencanaan.⁶

Ada suatu keunggulan organisasi yang sukses dibandingkan dengan organisasi yang gagal atau bangkrut yaitu terletak pada dinamika dan efektivitas kepemimpinan.⁷ Peter F. drucker: *points out that manager (business leader) are the basic and scarest resource of any business enterprice*⁸. Pimpinan perusahaan merupakan unsur pokok dan sumber yang langka didalam setiap perusahaan. Statistik perkembangan perusahaan menunjukkan bahwa setiap 100 perusahaan yang baru berdiri, kira-kira 50% gagal dalam tempo 2 tahun dan pada akhir tahun kelima hanya tinggal 30% yang masih jalan, pada umumnya kegagalan itu di sebabkan oleh kepemimpinan yang tidak efektif, mereka tidak mampu memipin karyawan, tidak bisa bekerja sama dengan orang lain atau mereka tidak bias menguasai, mengendalikan diri sendiri, Berbahagai

⁶ <http://marsceljrs.blogspot.co.id/pentingnya-kepemimpinan-dalam.html>. di akses 9-27-16

⁷ Buchari Alma, *Kewirausahaan*, (Bandung, Alfabeta. Cet ke-17, 2011) hal.162

⁸ *Ibid*, h 162

kekeliruan terjadi dibawah kepemimpinannya, Misalnya karyawan tidak bias di motivasi untuk bekerja lebih baik, kurang disiplin demikian pula dengan relasi perusahaan tidak terjalin kerjasama yang baik, dan juga perilaku pemimpin sendiri yang tidak bisa menjadi contoh. Seorang pemimpin yang baik adalah seorang pemimpin dalam oragnisasi, haruslah orang yang dapat menguasai dan mengembangkan diri sendiri, dan juga mampu menguasai serta mengarahkan dan mengembangkan para karyawanya.⁹

2. Fungsi Kepemimpinan Dalam Organisasi

Sementara pimpinan dapat muncul dalam organisasi informal yang terkadang justru pimpinan yang “diakui” oleh bawahan organisasi tersebut, karenanya pimpinan dapat merangkap sebagai manager. Fungsi manager dalam kapasitasnya sebagai pemimpin pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua. Kedua fungsi tersebut harus dijalankan agar organisasi/lembaga beroperasi secara efektif dan efesien. Fungsi pertama adalah fungsi-fungsi yang dihubungkan dengan tugas-tugas atau pemecah masalah. Hal tersebut menyangkut pemberian saran penyelesaian masalah-masalah yang berhubungan dengan operasi organisasi. Sedangkan fungsi yang kedua adalah fungsi-fungsi yang berhubungan dengan pemeliharaan kelompok atau sosial. Fungsi ini mencakup segala sesuatu yang dapat membantu kelompok (formal ataupun informal)

⁹ *Ibid*, h 163

berjalan lebih lancar, penengah perbedaan pendapat di antara mereka, membina keharmonisan mereka dan sebagainya.¹⁰

Kepemimpinan juga dibutuhkan para bawahannya, terutama mereka yang bersemangat ingin memberikan sumbangan pada pencapaian tujuan organisasi. Mereka memerlukan pimpinan sebagai motivator eksternal untuk menjaga agar tujuan organisasi selaras dengan tujuan pribadi mereka. Jadi dapat disimpulkan bahwa seorang pemimpin dalam organisasi terutama bagi bawahan, adalah sebagai motivator, adapun fungsi kepemimpinan organisasi pemimpin dalam organisasi adalah:

- a. Memprakarsai struktur organisasi
- b. Menjaga adanya koordinasi dan integrasi organisasi supaya semua beroperasi secara efektif
- c. Merumuskan tujuan institusional dan organisasional
- d. Menengahi pertentangan dan konflik-konflik yang muncul serta mengadakan evaluasi ulang
- e. Mengadakan revisi, perubahan, inovasi pengembangan dan penyempurnaan dalam organisasi¹¹

Fungsi sering diartikan dengan kegunaan suatu hal. Sedangkan, fungsi kepemimpinan sangat berhubungan dengan situasional sosial

¹⁰T. Hani Handoko, *Manajemen Personalia Dan Sumberdaya Manusia*, (Yogyakarta: BPFE, 1995), h. 299.

¹¹ Reksohadiprojo, Sukanto, dan T. Hani Handoko, *organisasi perusahaan*, (Yogyakarta : BPFE, Edisi II, 1991) h. 286-287

dalam kelompok atau organisasi dimana seorang pemimpin kelompok itu berbeda. Fungsi kepemimpinan merupakan gejala sosial, karena berlangsung dalam interaksi antar manusia sebagai makhluk social. Menurut Hadari Nawawi fungsi kepemimpinan memiliki dua dimensi interaksi sosial yang harus di perhatikan.¹²

1. Dimensi kemampuan pemimpin mengarahkan (Direction)

Dimensi ini merupakan aktivitas yang berupa tindakan-tindakan pemimpin dalam interaksi dengan anggota organisasinya, yang mengakibatkan semuanya berbuat sesuatu di bidangnya masing-masing yang tertuju pada tujuan organisasi. Dimensi ini tidak boleh dilihat dari segi efektivitas pemimpin, tetapi nampak dalam aktivitas organisasinya.

2. Dimensi tingkat dukungan (support dari anggota organisasinya).

Dimensi ini terbentuk keikut-sertaan (keterlibatan) anggota organisasi dalam kegiatan-kegiatan melaksanakan tugas-tugas pokoknya. Hadari Nawawi menjelaskan lebih lanjut bahwa dari kedua dimensi tersebut, secara operasional dapat dibedakan enam fungsi pokok kepemimpinan, kemudian selanjtnya keenam fungsi pokok tersebut dikelompokan dalam dua dimensi, pengelompokannya adalah dimensi kemampuan pemimpin di dalam mengarahkan terdiri dari fungsi, instruktif, fungsi konsultatif, fungsi pengendalian dan fungsi keteladanan.

¹² Hadari Nawawi, *kepemimpinan menurut islam*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001), h.135.

Sedangkan di dalam dimensi dukungan (support) dari anggota organisasinya terdiri dari fungsi partisipasi dan fungsi delegasi. Untuk lebih jelasnya keenam fungsi tersebut adalah¹³ :

a. Fungsi instruktif

Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah, namun harus komunikatif karena sekurang-kurangnya harus dimengerti oleh anggota organisasi yang menerima perintah.

b. Fungsi konsultatif

Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah. Karena berlangsung dalam bentuk interaksi antara pemimpin dan anggota organisasinya, fungsi ini diwujudkan pemimpin dalam menghimpun bahan sebagai masukan (input) apabila akan menetapkan berbagai keputusan penting yang bersifat strategis.

c. Fungsi partisipatif

Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah. Dalam menjalankan fungsi ini pemimpin harus berusaha mengaktifkan anggota organisasinya, sehingga selalu terdorong untuk berkomunikasi, baik secara horizontal, maupun vertikal. Setiap anggota di dorong agar aktif dalam melaksanakan tugas pokoknya, sesuai dengan posisi/jabatan atau wewenangnya masing-masing. Kondisi partisipasi anggota akan meningkatkan efisiensi penyelesaian masalah, penetapan keputusan

¹³ *Ibid*, h, 145-151

dan penyelesaian tugas pokok yang terarah pada pencapaian tujuan.

d. Fungsi delegasi

Fungsi delegasi adalah fungsi pemimpin dalam melimpahkan sebagian wewenangnya kepada staf pimpinan yang membantunya. Fungsi pendelegasian pada dasarnya berarti persetujuan atau pemberian izin pada anggota organisasi dalam posisi tertentu untuk menetapkan keputusan.

e. Fungsi pengendalian

Fungsi ini cenderung bersifat komunikasi satu arah, namun akan lebih efektif jika dilaksanakan melalui komunikasi dua arah. Fungsi dilaksanakan melalui kegiatan control atau pengawasan, bimbingan kerja, memberikan penjelasan dan contoh dalam kerja, latihan dilingkungan organisasi lain. Pengawasan yang bersifat pengendalian dilakukan pada saat kegiatan berlangsung, dengan wujud preventif yakni mencegah terjadinya penyimpangan atau kekeliruan dalam melaksanakan keputusan atau perintah pimpinan.

f. Fungsi keteladanan

Para pemimpin merupakan tokoh utama dilingkungan masing-masing. Seorang pucuk pimpinan diantara para pemimpin yang membantunya dan orang-orang yang di pimpin lainnya. Merupakan tokoh sentral yang menjadi pusat perhatian. Seorang pemimpin harus mampu memberikan teladan yang baik bagi para bawahannya, dan

menghiasi dirinya dengan sifat-sifat terpuji. Karena sikap dan perilaku pimpinan selalu dapat dirasakan dan diamati orang-orang yang di pimpinnya, dalam interaksi antar sesamanya setiap hari.

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ

وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عِبْدِينَ ﴿٧٣﴾

Artinya : Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah (QS.Al-anbiya:73)¹⁴

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya : Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya (Hr Bukhari)¹⁵

¹⁴ Al- Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Departemen Agama RI, 1984

¹⁵ <http://pesantrenonlinenusantara.blogspot.co.id> (akses pada tanggal 5 september 2016)

3. Tipe Kepemimpinan Dan Faktor-Faktor Kepemimpinan

Beberapa tipe pemimpin yang di kenal adalah sebagai berikut¹⁶:

a. Tipe Kharismatis

Kepimpinan kharimatik merupakan kekuatan energi, daya tarik yang luar biasa yang akan di ikuti oleh para pengikutnya. Pemimpin ini mempunyai keistimewaan tertentu misalnya mempunyai kekuatan gaib, manusia super, berani dan sebagainya.

b. Tipe Paternalistis

Kepimpinan paternalistis bersikap melindungi bawahan sebagai seorang bapak atau sebagai ibu yang penuh kasih sayang. Pemimpin tipe ini kurang memberikan kesempatan kepada karyawan untuk berinisiatif dan mengambil keputusan.

c. Tipe Militeristis

Kepimpinan militeristis banyak menggunakan system perintah, system komando dari atasan ke bawahan sifatnya keras sangat otoriter, menghendaki bawahan agar selalu patuh, penuh acara formalitas.

d. Tipe Otokratis

Kepimpinan otokratis berdasrnya kepada kekuasaan dan paksaan yang mutlak harus di patuhi. Pemimpinnya selalu berperan sebagai pemain tunggal, dia menjadi raja. Setiap perintah di tetapkan tanpa

¹⁶ Buchari Alma, *Op.Cit.* h 169.

konsultasi, kekuasaan sangat absolut.

e. Tipe Laissez Faire

Kepemimpinan laissez faire membiarkan bawahan berbuat semaunya sendiri semua pekerjaan dan tanggung jawab dilakukan oleh bawahan. Pemimpinya hanya merupakan symbol yang tidak memiliki keterampilan. Jabatan pemimpin diperoleh dengan jalan yang tidak benar mungkin melalui system nepotisme. Pemimpin ini tidak berwibawa, tidak mampu mengawasi karyawan tidak mampu mengkoordinasi, suasana kerja tidak kooperatif

f. Tipe Populistic

Kepemimpinan populistis ini menjadi pemimpin rakyat. Dia berpegang pada nilai-nilai masyarakat tradisional

g. Tipe Administratif

Kepemimpinan administrative ialah pemimpin yang mampu menyelenggarakan tugas-tugas administrasi secara efektif. Dengan kepemimpinan administratif diharapkan muncul perkembangan teknis, manajemen modern dan perkembangan social.

h. Tipe Demokratis

Kepemimpinan tipe demokratis berorientasi pada manusia dan memberikan bimbingan kepada pengikutnya. Tipe ini menekankan pada rasa tanggung jawab dan kerjasama yang baik antara karyawan. Kekuatan organisasi tipe demokratis terletak pada partisipatif aktif dari

setiap karyawan

Ada berbagai faktor yang mempengaruhi kepemimpinan, ada variabel kritis yang mempengaruhi kepemimpinan, yaitu kepemimpinan, pengikut, atau bawahan dan situasi.¹⁷

4. Kepemimpinan Yang Efektif Dan Aspek-Aspek Kepribadian Pemimpin

Dua konsep utama dalam mengukur prestasi kerja dalam manajemen adalah efisiensi dan efektivitas. Efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar. Seorang manajer yang efisien adalah seorang yang mencapai keuluran yang lebih (hasil, produktivitas dan performance) dibandingkan masukan-masukan (tenaga kerja, bahan, uang, mesin dan waktu) yang digunakan. Sedangkan efektivitas adalah kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain seorang manajer yang efektif dapat memilih pekerjaan yang harus dilakukan atau metode yang tepat untuk mencapai tujuan¹⁸. Dari pengertian efektivitas dapat diartikan bahwa kepemimpinan yang efektif adalah kepemimpinan yang dilakukan dengan cara yang tepat untuk mencapai tujuan lembaga atau organisasi yang dipimpin.

Ross perot seperti yang dikutip oleh M. Tolhah hasan berkeyakinan bahwa pemimpin yang efektif adalah faktor yang sangat penting dalam

¹⁷ T. Hani Handoko, *Op Cit*, h. 307

¹⁸ Hadari Nawawi. *Op Cit*. h. 295

dunia saat ini, baik dalam dunia politik, ekonomi, ataupun yang lainnya. Akan tetapi sayangnya factor tersebut tidak ada pada diri seorang pejabat yang memimpin.¹⁹

Kepemimpin yang efektif itu adalah pemimpin yang sangat pemimpin menerjemahkan fungsinya dengan perilaku, efektivitasnya bukan karena perintah yang yang menggema dimana-mana akan tetapi terletak pada perilaku yang memperkaya pembicaraan, menerjemahkan tugas kepemimpinannya dalam suasana penuh kehati-hatian dan ketenangan, sehingga hasil pekerjaannya semakin maju, produktivitas meningkat dan target pun tercapai.²⁰

Adapun factor pembentuk efektivitas menurut Sondang P. Siagian, terjadi perdebatan tentang fakto-faktor yang sudah berlangsung lama, baik dikalangan ilmuan, maupun dikalangan praktisi bahkan sifatnya sudah permanen dan nampaknya akan terus berlanjut dimasa yang akan datang.²¹

Dalam hal efektivitas kepemimpinan paradigma yang mendekati kebenaran ilmiah yang di dukung oleh pengalaman oleh praktisi mengatakan bahwa efektivitas kepemimpinan seseorang dilandasi dengan modal yang dibawa sejak lahir, akan tetapi di ditumbuhkan dan di

¹⁹ M. Tolhah Hasan, *Prospek Islam Dalam Menghadapi Tantangan Zaman*, (Jakarta: Lantaboras press, 1998) h.41

²⁰ Jamal Mahdi, *Menjadi Pemimpin Yang Efektif Dan Berpengaruh*, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2004) h. 3

²¹ Sondang.P. Siagian, *toeri dan praktek kepemimpinan*, (jakarta : Rhineka cipta,2003) h.8

kembangkan melalui dua jalur yaitu adanya kesempatan untuk menduduki jabatan pemimpin dan tersedianya kesempatan yang cukup luas menempuh pendidikan dan pelatihan.

Jamal mahdi menambahkan, factor penyebab efektivitas itu tidak hanya tergantung pada cirri pengetahuan dan intelektualitas, kecapan khusus, kualitas pengikut, aktivitas pemimpin ataupun juga tugas dari seorang pemimpin. Akan tetapi dalam diri seorang pemimpin harus terpenuhi beberapa karakter efektivitas berikut²² :

1. Dia merupakan anggota yang baik dalam kelompok.
2. Meyakini kapasitas masing-masing anggota.
3. Mahir berinterkasi dengan mereka.
4. Bekerja menciptakan iklim kerja yang penuh toleransi.

Pemimpin yang mampu menggerakkan anggotanya untuk mencapai tujuan organisasi untuk sementara dikategorikan sebagai pemimpin yang efektif.

Setiap pemimpin sebagai individu untuk mewujudkan kepemimpinan yang efektif dan di ridhai Allah SWT dengan kepribadiannya sebagai orang yang beriman harus menampilkan sikap dan perilaku sebagai berikut :

- a. Mencintai keberadaan dan hanya takut pada Allah SWT. Pemimpin yang berpegang teguh pada Allah akan terus menerus berusaha

²² Jamal Mahdi, *Op Cit*, h. 6

menegakan kebenaran berdasarkan tuntunan ajaran islam, akan disegani, dan dihormati, dan dipatuhi pemimpin yang mencaintai kebenaran hanya takut pada Allah SWT, sebagai sumber dan pemilik kebenaran yang maha sempurna.

- b. Dapat di percaya, bersedia, dan mampu mempercayai orang lain. Pemimpin yang dapat di percaya, mampu mempercayai orang lain dan memiliki kepercayaan diri merupakan pemimpin yang bertanggung jawab. Sikap percaya diri pada seorang pemimpin bukanlah pada kesombongan pada kemampuan dirinya, tetapi merupakan keyakinan bahwa dirinya memiliki kemampuan menjalankan kepemimpinan yang efektif dalam bidangnya.
- c. Memiliki kemampuan dalam bidangnya dan berpandangan luas didasari didasari kecerdasan (intelegeni) yang memadai. Seorang pemimpin tidak cukup hanya mempunyai kemampuan memimpin namun pemimpin harus mengetahui seluk beluk bidang yang di kelola organisasinya, dengan demikian pemimpin akan mampu memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan pada anggota organisasi yang memerlukannya. Kemampuan di bidangnya akan sangat besar pengaruhnya terhadap peningkatan kualitas organisasinya.
- d. Senang bergaul, ramah tamah, suka menolong, dan member petunjuk serta terbuka pada kritik orang lain. Pemimpin yang suka bergaul harus mempunyai sifat dan sikap rendah hati, sederhana dan emosionalitas

yang stabil. Ketiga sifat dan sikap tersebut harus terlihat wajar dan alami dalam penampilan dan perilakunya.

- e. Memiliki semangat untuk maju, semangat pengabdian dan kesetiakawanan, serta kreatif dan penuh inisiatif. Dalam kepribadian pemimpin yang beriman, pengabdian dan kesetiakawanan sepenuhnya di tumpahkan pada cita-cita menegakan ajaran islam, yang berarti juga semata-mata di tunjukan pada Allah SWT dan Rasulnya. Pemimpin dalam organisasi yang manapun (tidak saja yang bersifat keagamaan) selalu menyelaraskan cita-cita organisasinya atas ridhanya.
- f. Bertanggung jawab dalam mengambil keputusan dan konsekuen, Berdisiplin Serta bijakasana dalam melaksanakannya. Pemimpin yang konsekuen merupakan pemimpin yang berdisiplin, karena kemampuan untuk menaati keputusan dan perintah yang berarti bersedia bekerja dalam jangka waktu yang seharusnya. Pemimpin merupakan seorang yang mampu menegakan kedisiplinan kerja dan disiplin waktu, baik secara perorangan. Sifat dalam kepemimpinan yang seperti itu sangat penting bagi pemimpin yang beriman .
- g. Aktif memelihara kesehatan jasamani dan rohani. Pemimpin yang sehat jasmani dan rohani serta beriman dalam mengatasi rintangan, hambatan dan memecahkan masalah selalu mampu bekerjasama, yang memungkinkan memperoleh pertolongan yang terbaik dari anggota organisasinya.

5. Gaya kepemimpinan islam

Sebagian besar definisi mengenai kepemimpinan mencerminkan asumsi bahwa kepemimpinan menyangkut sebuah proses pengaruh sosial yang dalam hal ini pengaruh yang sengaja dijalankan oleh seseorang terhadap orang lain untuk menstruktur aktivitas-aktivitas serta hubungan-hubungan di dalam sebuah kelompok atau organisasi. Dalam kenyataannya para pemimpin dapat mempengaruhi moral dan kepuasan kerja, keamanan, kualitas kehidupan kerja dan terutama tingkat prestasi suatu organisasi. Para pemimpin juga memainkan peranan kritis dalam membantu kelompok, organisasi, atau masyarakat untuk mencapai tujuan.²³ Tugas pokok seorang manajer atau pemimpin adalah mengintegrasikan variabel-variabel organisasi dan sumberdaya manusia ke dalam bentuk system sosio-teknik secara efektif. Cara khas yang seringkali dilakukan adalah dengan menciptakan sebuah situasi supaya tujuan-tujuan dan teknologi bisa disusun.²⁴

Bagi umat muslim pemimpin yang utama dan terutama adalah Allah, dan semuanya terikat oleh keimanan untuk mematuhi hukum Allah. Jadi, semua pemimpin dalam segala organisasi baik bisnis,

²³ T. Hani Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta : BPFE, 1995), h. 348

²⁴ Ambar T. Sulistiyani dan Rosidah, *Manajemen Sumberdaya Manusia: Konsep, Teori dan Pengembangan Dalam Konteks Organisasi Public*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003), h. 54

politik maupun agama juga pengikut Allah. Ini memberikan batas bagi para pemimpin islam dan menentukan tugas mereka dalam melayani orang-orang yang mereka pimpin. Dalam pemikiran islam, pemimpin teladan haruslah luhur sekaligus bersahaja, memiliki visi dan inspirasi, dan melayani rakyatnya.²⁵ Seorang pemimpin harus menjadi teladan atau mewujudkan sifat-sifat yang diharapkan, dan dikagumi kelompok yang diurusi. Misalnya, pemimpin tentara perlu menunjukkan keberanian dan sifat-sifat perwira.²⁶ Hal tersebut di atas merupakan salah satu contoh dari aspek keteladanan pemimpin yang harus diikuti oleh kaumnya dan menjadi salah satu contoh perbuatan yang baik dan terpuji untuk para anggotanya (karyawannya) Seorang pemimpin harus mempunyai keberanian seperti salah satu sifat Muhammad. Keberanianlah yang membuat orang bisa menghadapi bahaya tanpa takut, bertindak dengan berani di bawah tekanan, dan bertahan melalui kesulitan.

Semua anggota kelompok, organisasi, atau masyarakat sepanjang zaman adalah sama, mereka semua manusia dengan hakikat kemanusiaan yang umum dan tetap. Maka seorang pemimpin sejati adalah orang yang menjadi teladan dalam sifat-sifat manusia tertentu, seperti kelembutan, sifat manusiawi dan welas asih

²⁵ john Adair, *Kepemimpinan Muhammad*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010)

,h2

²⁶ *Ibid*, h.18.

Sifat-sifat pemimpin sejati lain adalah rendah hati. Kata rendah hati dalam bahasa inggris (*humility*), berasal dari kata latin (*humus*) atau tanah, yang terkait dengan homo atau manusia.²⁷ ketika Muhammad menghamparkan jubahnya, lalu duduk di lantai sama rendah dengan orang-orang lain, itu contoh kerendahan hati.

Kepemimpinan dilaksanakan di depan. Dalam konteks manusia, pemimpin manusia tidak selalu secara fisik berada di depan dalam perjalanan sebagaimana penggembala yang sekali-kali ada di belakang kawanan yang bergerak. Namun, secara spiritual pemimpin adalah orang yang memimpin di depan. Dalam kepemimpinan, teladan adalah segalanya. Bila pemimpin layak dihormati, maka rakyat akan bersedia bekerja untuknya. Bila kebajikan pemimpin layak dikagumi, wewenang pemimpin dapat ditegakkan.

Dalam perjalanan, pemimpin suatu kaum adalah pelayan kaum itu. Menuntaskan tugas dengan sukses, memelihara kesatuan atau keutuhan kelompok, dan memperhatikan individu-individu. Mengabdikan untuk memimpin, Muhammad mempelajari pelajaran berharga itu. Contoh pengabdian sederhana yang diberikannya kepada kaum yang dipimpinnya Mereka yang memegang peran pemimpin, harus mempunyai integritas untuk menjadi penerang bagi kaumnya,

²⁷ *Ibid*, h.19.

mempunyai kepercayaan dan tanggungjawab bahwa pemimpin tersebut benar- benar dapat mengayomi masyarakatnya.

Dengan sama-sama merasakan susah payah, bahaya, dan kesukaran yang dialami pengikutnya, Muhammad memberi contoh satu kaidah universal kepemimpinan yang baik. Itulah yang dari lubuk hati terdalam diharapkan masyarakat terhadap pemimpinnya, dan kalau tidak terjadi, selalu muncul komentar yang tidak baik. Pemimpin harus memperhatikan nasihat atau pendapat seseorang, walaupun itu berasal dari bawahannya.

Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang akan diikuti bawahannya, baik dalam keadaan sulit maupun mudah, dalam keadaan baik maupun buruk, karena mereka punya kepercayaan kepada sosok pemimpin, kemampuan pemimpin, pengetahuan pemimpin akan tugas yang dilakukan, dan karena mereka tahu mereka penting bagi sang pemimpin.

Dalam islam istilah kepemimpinan dikenal dengan istilah *khilafah*, imamah dan *ulil amri*. Juga ada istilah *rafin*. Kata khalifah mengandung makna ganda, di satu pihak khalifah diartikan sebagai kepala negara dalam pemerintahan dan kerajaan islam di masa lalu, yang dalam konteks kerajaan pengertiannya sama dengan kata *sulthan*. Di pihak lain, cukup dikenal pengertian *khalifah* sebagai wakil

Tuhan di muka bumi. Yang dimaksud wakil Tuhan itu ada dua macam. Pertama, yang diwujudkan dalam jabatan *sulthan* atau kepala negara. Kedua, fungsi manusia itu sendiri di muka bumi, sebagai ciptaan Tuhan yang paling sempurna.²⁸ Di samping pemimpin harus sehat dan kuat, seorang pemimpin mempunyai sifat-sifat utama rasul, yaitu: benar (*shiddiq*), terpercaya (amanah), yakni bersedia memikul tanggungjawab dengan aman dan tanpa keraguan, menyampaikan, melaksanakan tugas (*tabligh*), dan cerdas (*fathanah*), serta mencintai persatuan dan benci perpecahan²⁹

B. Lembaga Pengelola Zakat

1. Pengertian Lembaga pengelola Zakat

Lembaga pengelola Zakat atau Baitumal berasal dari bahasa Arab “bait” yang berarti rumah dan “al-maal” yang berarti harta. Jadi secara etimologis Baitulmal berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. Adapun secara terminologis, sebagaimana uraian Abdul Qadim Zallum dalam kitabnya *Al-amwaal fi Daulah Al Khilafah*, Baitumal adalah suatu lembaga atau pihak (al-jihat) yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta yang umat baik berupa pendapatan maupun pengeluaran Negara . Jadi, setiap harta baik rumah, bangunan,

²⁸ Imam Moedjono, *Loc.Cit*, h. 10

²⁹ Ali Muhammad Taufiq, *Praktik Manajemen Berbasis Al-Qur'an* , Jakarta: Gema Insani Press, 2004, h. 37.

barang tambang, uang, komoditas perdagangan, maupun harta benda lainnya dimana kaum muslimin berhak memilikinya sesuai syara' dan tidak di tentukan individu pemiliknya walaupun telah berbentuk pihak yang berhak menerimanya, maka harta tersebut menjadi hak Baitulmal, yakni sudah dianggap sebagai pemasukan Baitulmal³⁰

Secara istilah, kata baitulmal tidak ada dalam nash syariah, Namun syariah telah memberikan ketentuan tentang harta Negara, pos sumber pendapatan Negara, dan pos pembelajaan harta Negara itu. Syariah telah menetapkan harta-harta yang menjadi kaum Muslim sekaligus menetapkan pembelajaan yang menjadi kewajiban Negara dan hak bagi kaum Muslimin. Semua harta baitulmal. Pada sisi ini, baitulmal itu merupakan ungkapan tentang lembaga pengelolaan pos-pos pemasukan dan pengeluaran harta-harta kaum muslimin. Baitulmal sebagai lembaga pengelola keuangan Negara yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran belanja Negara telah mulai diterapkan sejak pemerintahan Rasulullah SAW. Pengelolaan baitulmal ini kemudian diteruskan oleh khalifah selanjutnya, hingga akhirnya kekhilafahan Islam runtuh pada tahun 1924 M.³¹

Undang-undang No.38 Tahun1999 tentang Pengelolaan Zakat pada bab III pasal 6 dan 7 menegaskan bahwa lembaga pengelola zakat di

³⁰ Nurul huda dkk, *keuangan publik Islam*,(Jakarta, kharima putra utama,2012) ,h 272

³¹ *Ibid.* h.273

Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk masyarakat.³²

2. Fungsi Lembaga Pengelola Zakat

Untuk dapat mengumpulkan zakat dan mendistribusikannya untuk kepentingan *mustahik*, pada tahun 1999, dibentuk Undang-Undang (UU) tentang Pengelolaan Zakat, yaitu UU No. 38 Tahun 1999. UU ini kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU Pengelolaan Zakat dan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Sebelumnya pada tahun 1997 juga keluar Keputusan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 1998, yang memberi wewenang kepada masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin untuk melakukan pengumpulan dana maupun menerima dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah (ZIS). Diberlakukannya beragam peraturan tersebut telah mendorong lahirnya berbagai Lembaga Pengelola

³² Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2009) h 419

Zakat (LPZ) di Indonesia. Kemunculan lembaga-lembaga itu diharapkan mampu merealisasikan potensi zakat di Indonesia.³³

Dalam menjalankan fungsinya lembaga pengelola zakat mengacu pada Undang-undang dasar tahun 2011 bab II pasal 7 ayat 1 berbunyi:³⁴

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
- d. pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat

3. Pentingnya Lembaga Pengelola Zakat

Secara defenitif, Lembaga pengelola zakat (LPZ) merupakan sebuah institusi yang bertugas dalam pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah, baik yang dibentuk oleh pemerintah seperti BAZ, maupun yang dibentuk oleh masyarakat dan dilindungi oleh pemerintah seperti LAZ. Bahwa "Pengelolaan zakat adalah

³³ Syamsul Rizal Hamid, *206 Petuah Rasulullah Saw. Seputar Masalah Zakat & Puasa*, Cahaya Salam, 2006, h. 48.

³⁴ Uud tahun 2011 bab II pasal 7 ayat 1

kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan peng-koordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.³⁵

Pembentukan Badan Amil Zakat merupakan wujud nyata perhatian pemerintah terhadap kehidupan umat Islam, sehingga diperlukan sebuah mekanisme yang mampu mengalirkan kekayaan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat mampu (*the have*) kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu (*the have not*)³⁶. Zakat adalah instrumen penting dalam sektor ekonomi Islam dan mendorong kemajuan dan kemakmuran umat Islam di seluruh dunia. Untuk itu, institusi zakat perlu diatur dan diurus dengan efisien dan sistematis karena sejak sekian lama zakat menjadi wilayah dan medium terpenting untuk pengurusan ekonomi dalam masyarakat Islam. Melalui sistem pendistribusian yang baik, zakat dapat menjadi alternative kestabilan krisis ekonomi yang sedang melanda dunia.

Menurut ulama kontemporer, Yusuf al-Qaradhawi dalam bukunya *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan* bahwa zakat bukan sekedar kemurahan individu merupakan suatu sistem tata sosial yang dikelola oleh negara melalui aparat tersendiri. Aparat ini

³⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat 1.

³⁶ Achyar Rusli, *Zakat Pajak Kajian Hermeneutic Terhadap Ayat-ayat Zakat dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Renanda, 2005) cet ke-1, h. 103.

mengatur semua permasalahan, mulai dari pengumpulan dari para wajib zakat dan pendistribusian kepada mereka yang berhak.³⁷

Menurut ajaran Islam, zakat sebaiknya dipungut oleh negara atau lembaga yang diberi mandat oleh negara dan atas nama pemerintah bertindak sebagai wakil fakir dan miskin. Pengelolaan di bawah otoritas yang dibentuk oleh negara akan jauh lebih efektif pelaksanaan fungsi dan dampaknya dalam membangun kesejahteraan umat yang menjadi tujuan zakat itu sendiri, dibanding zakat dikumpulkan dan didistribusikan oleh lembaga yang berjalan sendiri-sendiri yang tidak ada koordinasi.³⁸ Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011, pentingnya lembaga pengelola zakat adalah:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan³⁹

Pemerintah juga telah membentuk Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Undang-undang memuat tentang pengelolaan zakat yang terorganisir dengan baik, transparan dan professional dilakukan oleh amil resmi yang ditunjuk oleh

³⁷ Yusuf Al- Qaradhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan* (Jakarta:Gema Insani Press, 1997) h. 106-107.

³⁸ M. Arifin Purwakananta dan Noor Aflah, *Southeast Asia Zakat Movement* (Padang :Forum Zakat (FOZ), 2008) h. 36.

³⁹ UU No. 23 Tahun 2011

pemerintah, baik Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun Badan Amil Zakat (BAZ). Zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat harus segera disalurkan kepada para mustahiq sesuai dengan skala prioritas yang telah ditentukan.⁴⁰

4. Tujuan Dan Hikmah Pengelolaan Zakat

Tujuan pengelolaan zakat menurut undang-undang No. 38 Tahun 1989 adalah⁴¹ :

- a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.
- b. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan social
- c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Sedangkan hikmah Zakat antara lain⁴² :

- a. Menghindari kesenjangan sosial antara aghniya dan du'afa.
- b. Pilar mana jama'i antara aghniya dan para mujahid dan da'I yang berjuang dan berdakwah dalam rangka meninggikan kalimat Allah SWT.
- c. Membersihkan dan mengkikis akhlak yang buruk
- d. Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat

⁴⁰ Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta:Gema Insani Press, 2002), cet ke-1, h.132.

⁴¹ *Ibid.* h. 401

⁴² *Ibid.*, h. 401

- e. Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan.
- f. Untuk pengembangan potensi umat
- g. Dukungan moral kepada orang yang baru masuk islam
- h. Menambah pendapatan Negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi umat.

5. Mekanisme Pengelolaan Hasil Pengumpulan Zakat

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Oleh karena itu, untuk optimalisasi pendayagunaan zakat di perlukan pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat yang professional dan mampu mengelola zakat secara tepat sasaran.

Menurut Didin Hafiduddin, pengelolaan zakat melalui lembaga amil didasarkan beberapa pertimbangan. *Pertama*, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat. *Kedua*, menjaga perasaan rendah diri para musathik apabila berhadapan langsung untuk menerima haknya dari muzaki. *Ketiga*, untuk mencapai efesiensi, efektivitas dan sasaran yang tepat dalam menggunakan harta zakat menurut skala prioritas yang ada di suatu tempat misalnya apakah disalurkan dalam bentuk konsumtif ataukah dalam bentuk produktif untuk meningkatkan kegiatan usaha para mustahik. *Keempat*, untuk memperlihatkan syiar Islam dan semangat penyelenggaraan Negara dan pemerintahan yang Islami. Sebaliknya, jika penyelenggaraan zakat itu begitu saja diserahkan

kepada para muzaki, maka nasib dan hak-hak orang miskin dan para mustahik lainnya terhadap orang-orang kaya tidak memperoleh jaminan pasti.

C. Strategi pengelolaan zakat. infak, sadaqah

1. Pengertian Strategi

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani yang berarti: kepemimpinan dalam ketentaraan. Konotasi ini berlaku selama perang yang kemudian berkembang menjadi manajemen ketentaraan dalam rangka mengelola para tentara bagaimana melakukan mobilisasi pasukan dalam jumlah yang besar, bagaimana mengkoordinasikan komando yang jelas, dan lain sebagainya.⁴³

Manajemen strategi merupakan kumpulan keputusan dan tindakan yang digunakan dalam penyusunan dan implementasi strategi, yang akan menghasilkan kesesuaian superior yang kompotitif antara organisasi dan lingkungannya, untuk meraih tujuan organisasi.⁴⁴

Ada beberapa macam mengenai pengertian manajemen strategi. Pertama, manajemen strategi adalah proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan cara melaksanakannya, yang dibuat

⁴³ Crown Dirgantoro, *Manajemen Stratejik Konsep, Kasus Dan Implementasi*, (Jakarta: Grasindo, 2001), h. 5

⁴⁴ Richard L. Daft, *Manajemen*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), h. 355

oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuannya.

Kedua, manajemen strategi adalah usaha manajerial menumbuhkan kekuatan organisasi untuk mengeksploitasi peluang yang muncul guna mencapai tujuannya yang telah ditetapkan sesuai dengan misi yang telah ditentukan

Ketiga, manajemen strategi adalah arus keputusan dan tindakan yang mengarah pada pengembangan suatu strategi atau strategi-strategi yang efektif untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Keempat, manajemen strategi adalah perencanaan berskala besar yang berorientasi pada jangkauan masa depan yang jauh, dan ditetapkan sebagai keputusan manajemen puncak agar memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif.⁴⁵

Perencanaan strategi adalah proses manajerial untuk mengembangkan dan mempertahankan kesesuaian terus menerus antara tujuan, keterampilan dan sumber daya organisasi dengan peluang pasar yang terus berubah.⁴⁶

⁴⁵H. Hadari Nawawi, *Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang pemerintahan Dengan Ilustrasi Di Bidang Pendidikan*, (Yogyakarta: UGM Press, 2000), h. 148-149

⁴⁶ Murni Sumarni, *Manajemen Pemasaran Bank (Edisi Revisi)*, (Yogyakarta: Liberti, 1993) h. 156

2. Tahapan Manajemen Strategi

Ada beberapa tahap yang dilalui dalam proses manajemen strategi yaitu :

a.) Perumusan Misi Organisasi

Bagi suatu organisasi atau perusahaan penentuan misi sangat penting karena misi itu bukan hanya sangat mendasar sifatnya, akan tetapi membuat organisasi memiliki jati diri yang bersifat khas. Dengan kata lain misilah yang membedakan satu organisasi dari organisasi lainnya yang sejenis, dalam arti bergerak dibidang serupa.⁴⁷

b.) Penentuan Profil Organisasi

Peranan profil organisasi menjadi sangat penting dalam melihat apa yang mungkin atau tidak mungkin dikerjakan oleh badan dalam organisasi. Tidak kurang pentingnya untuk memperhatikan adalah bahwa profil organisasi juga menggambarkan sejarah organisasi dimasa lalu dikaitkan dengan sistem nilai dan kultur korporasi yang dianut dibandingkan dengan kondisi yang dihadapi sekarang untuk digunakan sebagai dasar meramalkan kemampuan organisasi dimasa depan.⁴⁸

⁴⁷ Sondang P. Siagian, Manajemen Stratejik, Jakarta: Bumi Aksara, 2005, h.31

⁴⁸ *Ibid*, h. 32

c.) Analisis dan Pilihan Strategi

Pada umumnya disadari bahwa menentukan pilihan yang sifatnya strategi bukanlah hal yang mudah. Sebelum pilihan dijatuhkan pada satu alternatif tertentu, diperlukan terlebih dahulu suatu analisis strategi yang dimaksudkan untuk menyetarakan setiap peluang yang diperkirakan akan timbul dengan tujuan atau sasaran jangka panjang tertentu. Pada gilirannya, tujuan dan sasaran jangka panjang tersebut dikaitkan pula dengan cara-cara yang paling memberikan harapan.⁴⁹

d.) Penentuan Strategi Induk

Untuk mencapai berbagai sasaran yang telah ditentukan, setiap organisasi memerlukan strategi induk. Yang dimaksud dengan strategi induk adalah suatu rencana umum yang bersifat menyeluruh atau komprehensif yang mengandung arahan tentang tindakan-tindakan utama yang apabila terlaksana dengan baik akan berakibat pada tercapainya berbagai sasaran jangka panjang dalam lingkungan eksternal yang bergerak dinamis.

e.) Penentuan Strategi Operasional

Telah diketahui bahwa suatu organisasi terdiri dari berbagai satuan kerja yang dikenal dengan berbagai nomenklatur seperti

⁴⁹ *Ibid*, h. 35

departemen, divisi, bagian, seksi dan lain sebagainya yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan fungsional seperti produksi, pemasaran, keuangan, akunting, sumber daya manusia dan berbagai fungsi organisasional lainnya.

f.) Perumusan Kebijakan

Kebijakan merupakan bagian dari upaya menjamin bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam organisasi dimaksudkan untuk mencapai berbagai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

g.) Penciptaan Sistem Pengawasan

Maksud dari sistem pengawasan ini adalah untuk mengetahui apakah dalam pelaksanaan terdapat penyimpangan disengaja atau tidak dari rencana dan program yang telah ditentukan sebelumnya

h.) Penciptaan Sistem Umpan Balik

Manajemen puncak sangat berkepentingan memperoleh umpan balik tentang bagaimana strategi yang telah ditetapkan diimplementasikan. Dengan umpan balik yang faktual, tepat waktu dan objektif, manajemen puncak memperoleh pengetahuan tentang segi-segi keberhasilan organisasi maupun kurang berhasilannya, atau bahkan kegagalannya. Sekaligus dapat diketahui faktor-faktor

penyebabnya yang pada gilirannya dimanfaatkan dalam melakukan proses manajemen strategi berikutnya⁵⁰

3. Strategi Badan Amil Zakat

Tampaknya, pendekatan lama yang cenderung menunggu bola sudah tidak tepat lagi diterapkan saat ini. Sikap menunggu bola, yaitu menunggu ada kelebihan dana kemudian baru berpikir, akan menimbulkan kontradiksi sasaran dan manfaat pendayagunaan. Disinilah letak pentingnya BAZ sedari awal menciptakan strategi sebagai dasar referensi organisasi, anggaran, sistem, pengukuran, kinerja, penetapan sasaran, pemilihan jenis usaha, program kerja harian pegawai amil dan lainnya.⁵¹

Strategi yang baik mencerminkan BAZ memiliki kemampuan teknis ilmiah yang lebih tinggi untuk mencapai tujuannya, khususnya dalam menciptakan kesempatan kerja dan mengubah keadaan ekonomi.⁵²

Dengan berfokus pada strategi, BAZ akan mengetahui bagaimana cara menyelamatkan dirinya agar eksis dalam mendayagunakan dana masyarakat dimasa depan. Ada lima poin pola pengembangan yang perlu diterapkan BAZ.

⁵⁰ *Ibid*, h. 41

⁵¹ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008) h. 140

⁵² *Ibid*, h. 142

1. Pengenalan Masalah

Dalam menanggulangi permasalahan sosial disuatu tempat, yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah mengenali persoalan. Solusi tidak akan berguna bila persoalan tidak dikenali terlebih dahulu. Persoalan muncul karena ada penyebab dan penyebab mengakibatkan dampak. Permasalahan sosial yang umumnya sangat mencolok di daerah adalah kurang diperhatikannya kesejahteraan bagi masyarakat miskin dan kesenjangan social.

2. Penciptaan Peluang Bagi Mustahik

Menciptakan peluang usaha bagi para mustahik membutuhkan analisis keputusan yang tepat. Dengan analisis ini, BAZ daerah dapat menentukan prioritas apa yang memiliki tingkat kemaslahatan yang penting. Pemilihan prioritas didasarkan pada rasio peluang, rasio harapan dan rasio kemampuan, baik dalam bentuk tersedianya dana, maupun kapabilitas mudharib, teknik ini berguna dalam mengurangi dampak negative keresahan sosial.

3. Mengembangkan Usaha Produktif

Kegiatan industri kecil di daerah yang potensial menyerap banyak tenaga kerja meliputi pengelolaan barang produksi, pengelolaan limbah, pemanfaatan sumber daya alam, dan pendistribusinya. Hal ini dapat dijadikan kebijakan yang ditujukan untuk mencapai sasaran

pembangunan, yakni meningkatnya produktivitas masyarakat kecil meningkatnya lapangan kerja, dan terciptanya semangat pembentukan iklim SDM yang kreatif. Dengan menyediakan usaha produktif bagi masyarakat sehingga mereka dapat mengembangkan ekonomi keluarga mereka sendiri.

4. Membuat Jaringan Pengusaha Kecil

Industri kecil berbasis syari'ah harus solid bila tidak ingin tergilas zaman. Yang dibutuhkan adalah hadirnya asosiasi ekonomi industri kecil yang berbasis syari'ah pula. Asosiasi ini disesuaikan dengan ragam jenis industri yang digeluti.

Asosiasi ini bisa berbentuk koperasi syari'ah, maupun juga jaringan ekonomi syari'ah. Bila asosiasi ini bergerak dibidang agroindustri, ia dapat berupa koperasi dan JES yang bergerak agroindustri pula. Asosiasi ini akan berperan dalam mengokohkan bargaining position pengusaha-pengusaha kecil, baik dalam bentuk jaringan bisnis advokasi, maupun pertukaran informasi.

5. Memanfaatkan Peran Bappeda

Selaras dengan semangat otonomi daerah, maka desentralisasi untuk mengembangkan industri kecil akan berhasil bila dibarengi dengan penguatan peran serta masyarakat. Bappeda harus menciptakan perencanaan strategis bagi berkembangnya bisnis sektor ini.

Bappeda perlu juga bekerja sama dengan BAZ daerah untuk membicarakan soal kontribusi zakat, sedekah, dan dana sosial lainnya yang dapat dialokasikan untuk pengembangan investasi.⁵³

⁵³ *Ibid*, h. 147

BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Kepemimpinan BAZNAS Provinsi Lampung

1. Profil BAZNAS Provinsi Lampung

a. Latar Belakang Pendirian BAZNAS Provinsi Lampung

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. BAZNAS menjalankan empat fungsi, yaitu:

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Untuk terlaksananya tugas dan fungsi tersebut, maka BAZNAS memiliki kewenangan:

1. Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.
2. Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ
3. Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ.

Selama 11 tahun menjalankan amanah sebagai badan zakat nasional, BAZNAS telah meraih pencapaian sebagai berikut:

1. BAZNAS menjadi rujukan untuk pengembangan pengelolaan zakat di daerah terutama bagi BAZDA baik Provinsi maupun BAZDA Kabupaten/Kota
2. BAZNAS menjadi mitra kerja Komisi VIII DPR-RI.
3. BAZNAS tercantum sebagai Badan Lainnya selain Kementerian/Lembaga yang menggunakan dana APBN dalam jalur pertanggung-jawaban yang terklonsolidasi dalam Laporan Kementerian/Lembaga pada kementerian Keuangan RI.

Berbagai penghargaan bagi BAZNAS dalam empat tahun terakhir:

1. BAZNAS berhasil memperoleh sertifikat ISO selama empat tahun berturut-turut, yaitu:
 1. Tahun 2008 BAZNAS mendapatkan sertifikat ISO 9001:2000

2. Tahun 2009, 2010 dan 2011 BAZNAS kembali berhasil memperoleh sertifikat ISO, kali ini untuk seri terbarunya, ISO 9001:2008. BAZNAS adalah lembaga pertama yang memperoleh sertifikat ISO 9001:2008 untuk kategori seluruh unit kerja pada tahun 2009.
3. Tahun 2009, BAZNAS juga mendapatkan penghargaan The Best Quality Management dari Karim Business Consulting
4. BAZNAS berhasil memperoleh predikat Laporan Keuangan Terbaik untuk lembaga non departemen versi Departemen Keuangan RI tahun 2008.
5. BAZNAS meraih “The Best Innovation Programme ” dan “The Best in Transparency Management” pada IMZ Award 2011.¹

Latar Belakang Pendirian BAZNAS Provinsi Lampung Sesuai amanah Undang Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, maka struktur Badan Amil Zakat (BAZ) mulai dari tingkat Nasional sampai ke tingkat kecamatan harus ada. Untuk itu di Provinsi Lampung perlu adanya Badan Amil Zakat (BAZNAS) Provinsi Lampung yang mengelola dana zakat, infak dan sedekah. BAZNAS Provinsi Lampung berdiri pada tanggal 8 mei 2016 sesuai dengan Peraturan BAZNAS No. 03 Tahun 2014 tentang Organisasi BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten kota. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Lampung dibentuk untuk mencapai daya guna, hasil guna dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) sehingga dapat meningkatkan peran serta umat Islam Provinsi Lampung dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dengan pengumpulan dan

¹ www.baznaslampung.com 12-6-2016

pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS). Sebelum BAZNAS Provinsi Lampung dibentuk, pengumpulan dan pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah ditangani oleh BAZDA Provinsi Lampung²

Seiring berjalannya waktu BAZNAS Provinsi Lampung mengalami peningkatan dalam hal pengumpulan dan pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Hal ini dibuktikan dengan semakin bertambahnya perolehan dan meningkatkan pula dana yang disalurkan melalui program- program yang telah di bentuk.

Arah kebijakan umum BAZNAS Provinsi Lampung mengacu pada peraturan perundang-perundang yang berlaku yaitu :³

A. Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat

1. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 dan Penjelasan UU no.23 tahun 2011
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014
3. Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2014
4. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 01 Tahun 2014
5. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 02 Tahun 2014

B. Peraturan Perundang-undangan Kelembagaan BAZNAS

1. Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional

² Wawancara dengan pengurus harian baznas

³ www.baznaslampung.com 23-6-2016

2. Keputusan Menteri Agama Nomor 118 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi
3. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568 Tahun 2014
4. Peraturan BAZNAS No. 01 Tahun 2014 tentang Pengajuan Pertimbangan Pimpinan BAZNAS
5. Peraturan BAZNAS No. 02 Tahun 2014 tentang Pemberian Rekomendasi Pembentukan LAZ
6. Peraturan BAZNAS No. 03 Tahun 2014 tentang Organisasi BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten kota
7. Peraturan BAZNAS No. 04 Tahun 2014 – Pedoman Penyusunan RKAT BAZNAS

C. Peraturan Perundang-undangan Zakat Pengurang PKP

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2010
2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-33/PJ/2011

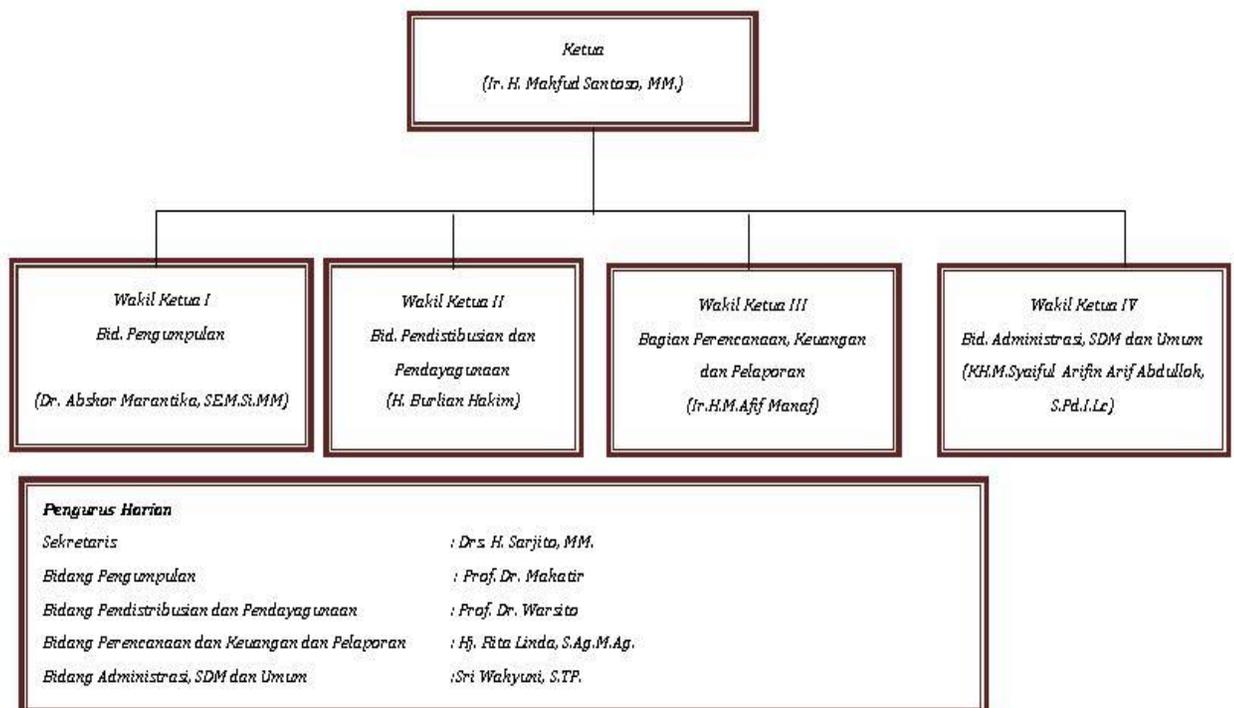
Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.⁴

Agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial,

⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009, h. 18

perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggungjawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan pembinaan, dan pelayanan kepada muzaki, mustahik dan pengelola zakat.

b. Struktur Organisasi Baznas Provinsi Lampung⁵



c. Visi misi organisasi

Visi : Menjadi Badan Zakat Nasional Prov. Lampung yang Amanah, Transparan dan Profesional.”

⁵ www.baznaslampung.com 23-5-2016

Misi :

1. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui amil zakat.
2. Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat nasional sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern.
3. Menumbuh kembangkan pengelola/amil zakat yang amanah, transparan, profesional, dan terintegrasi.
4. Mewujudkan pusat data zakat nasional.
5. Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.

d. Tujuan dan Sasaran Baznas Provinsi Lampung⁶**A. Tujuan**

- a. Melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi mengenai zakat kepada seluruh pegawai/karyawan yang beragama Islam di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Lampung.
- b. Mendorong dan memfasilitasi pegawai/karyawan yang beragama Islam di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Lampung untuk membayar zakat melalui BAZDA Provinsi Lampung yang akan berubah struktur menjadi BAZNAS Provinsi Lampung.

B. Sasaran

Sasaran dari program ini adalah pegawai/karyawan yang beragama Islam di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang diasumsikan berjumlah 96% (7.847 orang) dari 8.174 orang pegawai/karyawan sebagai muzaki.

⁶ www.baznaslampung.com 23-5-2016

e. Progam dan Produk BAZNAS Provinsi Lampung⁷

1. Progam BAZNAS⁸

a. Lampung Bertaqwa :

1. Pembinaan keimanan dan ibadah.
2. Pengkaderan ulama, da'i dan muballig.
3. Kegiatan keagamaan yang layak nya dibiayai dengan dana zakat.
4. Bantuan kebutuhan fukara/masakin untuk Ramadhan dan Idul Fitri.

b. Lampung Cerdas

1. Bantuan biaya pendidikan siswa berprestasi dari keluarga fukara/musakin.
2. Bantuan untuk guru/karyawan honorer yang gajinya tidak cukup.

c. Lampung Sejahtera

Bantuan permodalan bagi keluarga fukara/masakin untuk usaha produktif

d. Lampung Peduli :

Bantuan kebutuhan pangan, sandang, dan tempat tinggal fukara/masakin. Bantuan kepada individu atau lembaga yang tertimpa musibah/bencana.

e. Lampung Sehat :

Bantuan untuk fukara/masakin yang sakit, jompo, cacat fisik dan mental. Bantuan biaya perawatan dan transportasi pasien rumah sakit bagi fukara/masakin.

f. Paket Bantuan

⁷ www.baznaslampung.com 23-5-2016

⁸ www.baznaslampung.com 23-5-2016

2. Produk BAZNAS Provinsi Lampung

a. Zakat Peternakan

Zakat Hasil Ternak (salah satu jenis Zakat Maal) meliputi hasil dari peternakan hewan baik besar (sapi,unta) sedang (kambing,domba) dan kecil (unggas, dll). Perhitungan zakat untuk masing-masing tipe hewan ternak, baik nisab maupun kadarnya berbeda-beda dan sifatnya bertingkat. Sedangkan haulnya yakni satu tahun untuk tiap hewan.

Syarat Umum :

1. Sampai Nishab.
2. Berlalu satu tahun.
3. Tenaganya tidak dipergunakan untuk produksi.
4. Digembalakan

6. Zakat Saham dan Obligasi

Zakat yang wajib dikeluarkan atas kepemilikan surat berharga, termasuk diantaranya obligasi, reksadana dan saham bursa efek. Periode Haul : setelah dimiliki 1 tahun Nisab : 85 gram emas, Zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5 % dari total nilai bruto hal tersebut di atas

7. Zakat Atas Madu

Landasan hukum: Dari Amru bin Syuaib dari kakeknya dari Nabi SAW^ﷺ berkata: "Sesungguhnya Rasulullah SAW mengambil zakat madu sebesar 1/10"(HR Daruqutni). Berdasarkan hadits diatas ulama berbeda pendapat:

- a. Jumhur ulama tidak mewajibkan zakat madu dengan alasan tidak ada dalil yang kuat.
- b. Abu Hanifah dan Ahmad mewajibkan zakat madu dengan dasar keumuman ayat dan hadits.

8. Zakat atas Hasil Produksi Hewani

- a. Zakat atas produk hewani seperti harus diperlakukan sama dengan madu.
- b. Hal ini berlaku pula pada ternak-ternak piaraan yang memang khusus diambil susunya dan tidak merupakan barang dagangan
- c. Zakat atas produk hewani adalah sebesar sepersepuluh dari penghasilan bersih, atau setelah dikurangi biaya-biaya

d. Diantara ulama fiqh ada pula yang berpendapat jika seseorang yang membeli hewan untuk dijual produknya, misalnya sapi untuk dijual susunya, ulat sutera untuk dijual suteranya, atau sejenisnya; maka orang itu harus menghitung nilai benda-benda tersebut dengan produknya pada akhir tahun, lalu mengeluarkan zakatnya seperti zakat perniagaan (2,5%)

9. Zakat Emas, Perak dan Uang

Hadist yang diriwayatkan dari Ali ra, dia berkata, telah bersabda Rasulullah saw:

“Jika kamu mempunyai 200 dirham dan sudah cukup setahun maka zakatnya adalah 5 dirham, dan emas hanya dikenakan zakat bila sudah mencapai 20 dinar dan sudah cukup setahun, maka zakatnya adalah $\frac{1}{2}$ dinar setiap bertambah maka dengan hitungan tersebut. Tidak wajib zakat kecuali sampai cukup masa setahun”. (H.R Abu Daud)

10. Zakat Perniagaan

Ulama-ulama fikih menamakan zakat perniagaan dengan istilah “Harta Benda Perdagangan” (Arudz al Tijaroh), yakni: Semua yang diperuntukkan untuk dijual selain uang kontan dalam berbagai jenisnya, meliputi alat-alat, barang-barang, pakaian, makanan, perhiasan, binatang, tumbuhan, tanah, rumah, dan barang-barang tidak bergerak maupun bergerak lainnya.

11. Zakat Hasil Tambang

Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw pernah bersabda: [Pada “rikaz” harta galian, zakatnya seperlima (20%) [HR Bukhori Muslim].

1. Zakat Rikaz berbeda dengan zakat Barang Tambang.
2. Zakat Barang Tambang mencakup semua jenis, baik padat maupun cair.
3. Zakat Rikaz dan Barang Tambang tidak mensyaratkan nishab dan haul.
4. Tarif Zakat Rikaz 20% dan Zakat Barang Tambang 2,5 % kecuali ada kemiripan.
5. Mustahik Zakat Rikaz dan Barang Tambang sama dengan mustahikkin zakat lainnya.

12. Zakat profesi

Zakat profesi adalah zakat atas penghasilan yang diperoleh dari pengembangan potensi diri yang dimiliki seseorang dengan cara yang sesuai syariat, seperti upah kerja rutin, profesi dokter, pengacara, arsitek, dll. Dari berbagai pendapat dinyatakan bahwa landasan zakat profesi dianalogikan kepada zakat hasil pertanian yaitu dibayarkan ketika mendapatkan hasilnya, demikian juga dengan nishobnya yaitu sebesar 524 kg makanan pokok, dan dibayarkan dari pendapatan kotor. Sedangkan tarifnya adalah dianalogikan kepada zakat emas dan perak yaitu sebesar 2,5 %, atas dasar kaidah “Qias Asysyabah”.

a. Layanan BAZNAS⁹

1. Registrasi NPWZ
2. Konfirmasi Pembayaran
3. Jemput Zakat
4. Rekening BAZNAS Provinsi Lampung

2. Kepemimpinan Dari Segi Komunikasi¹⁰

- a. Atasan mengkomunikasikan informasi mengenai tugas, kebijakan kebijakan terkait organisasi.
- b. Atasan mengkomunikasikan hasil kinerja ke bawahannya.
- c. Karyawan dengan mudah dapat melakukan hubungan komunikasi dengan atasan.
- d. Setiap kendala pekerjaan yang terjadi karyawan mengkomunikasikan kepada atasan

⁹ www.baznaslampung.com 23-5-2016

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Rita linda selaku pengurus harian

- e. karyawan percaya terhadap rekan kerjanya dalam mengerjakan pekerjaan.
- f. dengan rekan kerja, kordinasi dan kerjasama terhadap pekerjaan dapat dengan mudah terbentuk
- g. Perbedaan divisi dan jabatan tidak menjadi penghalang bagi dalam memperoleh informasi.
- h. karyawan mempercayai informasi yang diberikan secara pribadi kepadanya
- i. Pimpinan selalu memberikan penggarahan atas setiap pekerjaan yang diberikan.

3. Kepemimpinan BAZNAS Dari Segi Gaya Kepemimpinan¹¹

- a. Pemimpin menjalin hubungan non formal kepada karyawan.
- b. Setiap pengambilan keputusan karyawan selalu dilibatkan.
- c. Pemimpin memberikan tugas yang menantang untuk dikerjakan
- d. Pemimpin meyakinkan karyawan bahwa karyawan mampu menyelesaikan tugas.
- e. Ada tuntutan oleh organisasi untuk melakukan inovasi dan pengambilan resiko pada setiap pekerjaan.
- f. ketelitian dan kecermatan dalam pekerjaan yang di lakukan.
- g. Dalam mengambil keputusan, organisasi selalu mempertimbangkan dampak keputusan tersebut kepada karyawan.

¹¹ Wawancara dengan Ibu Rita linda selaku petugas harian

- h. Kerja kelompok/tim lebih diutamakan dalam menyelesaikan pekerjaan.

4. Kepemimpinan Dari Segi Kinerja Karyawan¹²

- a. Pekerjaan karyawan diberikan dengan tenggang waktu/deadline.
- b. Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat lebih diutamakan dibanding keputusan perseorangan
- c. Karyawan menyelesaikan pekerjaan dengan sebaik baiknya.
- d. karyawan sigap dalam mengerjakan satu tugas ke tugas yang lainnya
- e. karyawan paham dan mengerti mengenai pekerjaan yang di lakukannya
- f. Disiplin waktu adalah hal yang utama bagi karyawan.
- g. Karyawan dengan mandiri mengerjakan tugas yang ditanggung jawabkan kepadanya.
- h. Kerja kelompok/tim lebih diutamakan dalam menyelesaikan pekerjaan.

B. Pengelolaan ZIS BAZNAS Provinsi Lampung

1. Sistem Pengelolaan ZIS di BAZNAS Provinsi Lampung¹³

Standar pengelolaan ZIS di BAZNAS Provinsi Lampung sebagai berikut:

1. Setiap awal tahun BAZNAS Provinsi Lampung menetapkan target pengumpulan ZIS dan strategi prioritas pendayagunaannya.

¹² Wawancara dengan pihak baznas

¹³ Wawancara dengan pihak baznas pada tanggal 7-10-16

2. Berdasarkan target dan strategi tersebut, BAZNAS Provinsi Lampung menyusun rencana dan program kerja, termasuk cara-cara yang harus ditempuh dalam pelaksanaannya.
3. Unit-unit operasional (BAZ tingkat Pemerintah Kotamadya, Kabupaten) melaksanakan rencana dan program kerja yang telah ditetapkan. Dengan diberikan kebebasan bertindak dalam pengembangan teknis operasional pengumpulan ZIS sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan kebijaksanaan atasan.
4. BAZNAS Provinsi Lampung menerima, memonitor dan memberikan bimbingan yang diperlukan. Kemudian menyimpan hasil pengumpulan ZIS di Bank dan melaporkan penyimpanan tersebut kepada BAZNAS pusat
5. Dalam rangka pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS yang terkumpul, BAZNAS provinsi Lampung langsung terjun ke lapangan untuk mencari mustahik yang berhak menerima ZIS
6. Merumuskan strategi kebijaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS untuk tahun yang bersangkutan, untuk diusulkan kepada Kepala Daerah guna memperoleh penetapan lebih lanjut.
7. Berdasarkan ketetapan kebijaksanaan Kepala Daerah tersebut, Ketua BAZNAS Provinsi Lampung menetapkan kebijaksanaan

pelaksanaan tentang alokasi dan rincian pendayagunaan hasil pengumpulan ZIS serta menyalurkan secara bertahap kepada yang berhak menerimanya.

8. BAZNAS Provinsi Lampung menyalurkan kepada mustahik
9. Mengadakan evaluasi terhadap segala kegiatan yang telah dilakukan pada tahun itu dan merumuskan program dan rencana kerja untuk tahun berikutnya berdasarkan kebijaksanaan (target dan strategi) pendayagunaan yang telah ditetapkan.

Dalam pendistribusian dan pendayagunaan hasil pengumpulan ZIS, BAZNAS Provinsi Lampung melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Pada akhir tahun anggaran mengeluarkan pemberitahuan atau pengumuman kepada khalayak ramai, agar para mustahik mengusulkan permintaan bantuan (santunan) kepada BAZNAS Provinsi Lampung melalui jalur masing-masing, seperti:
 - a. BAZ Kecamatan, untuk mustahik taraf Kecamatan.
 - b. BAZ Kotamadya, untuk mustahik taraf Kotamadya.
3. Menerima usulan-usulan dari, UPZ BAZ pada Unit/Satuan Kerja.

4. Merumuskan kebijaksanaan Kepala Daerah dalam mendayagunakan uang ZIS, sesuai dengan aspirasi/ usulan dari mustahik.
5. Menetapkan rincian pendistribusian dan pendayagunaan ZIS sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
6. Menyalurkan/membagikan dana ZIS kepada para mustahik.
7. Memonitor dan membina pemanfaatan ZIS yang diterima oleh mustahik.
8. Mengevaluasi pendayagunaan ZIS, untuk mengetahui apakah pendistribusian telah mencapai sasaran secara optimal, yaitu meningkatkan kesejahteraan umat, khususnya para duafa.
9. Meningkatkan tertib administrasi

2. Strategi Pengelolaan ZIS BAZNAS Provinsi Lampung

a. Strategi Penghimpunan ZIS

Untuk memaksimalkan penghimpunan dana ZIS, dilakukanlah beberapa upaya, antara lain :

1. Mensosialisasikan gerakan sadar zakat, infak, sedekah, dan yang sejenisnya pada kelompok masyarakat muslim terutama instansi pemerintahan provinsi Lampung. Cara ini dilakukan

melalui berbagai media; misalnya saja ketika ada acara di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang melibatkan muzaki potensial, maka BAZNAS yang akan mensosialisasikan gerakan sadar zakat, infak dan sedekah sejenisnya pada para muzaki potensial tersebut.

Selain itu, sosialisasi gerakan sadar zakat, infak dan sedekah, juga dilakukan melalui media majelis taklim yang banyak terdapat di masyarakat Lampung. Harapannya, masyarakat Lampung menjadi tergugah untuk bersama-sama menunaikan kewajibannya berzakat melalui wadah/tempat yang telah disediakan oleh pemerintah. Sehingga dengan demikian, dana yang terkumpul menjadi lebih besar dibandingkan jika muzaki berzakat secara individu. Dengan sokongan dana zakat yang besar, maka dapat diperoleh hasil (manfaat dari zakat tersebut) yang besar pula.

2. Membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Mengingat banyaknya instansi pemerintahan di Provinsi Lampung maka dibentuklah unit pengumpulan zakat di kantor instansi pemerintah. Pegawai negeri sipil dan swasta ini merupakan muzaki potensial, oleh karena itu disetiap instansi pemerintah dan swasta yang ada di Lampung mulailah didirikan

unit pengumpul zakat untuk memudahkan muzaki dalam menyerahkan dana ZISnya.

3. Menyediakan Transfer zakat Melalui Rekening

Dari nomer rekening yang disediakan terdapat beberapa muzaki yang menyetokan zakat, infak maupun sedekahnya melalui rekening kepada BAZNAS Provinsi Lampung, Berikut ini adalah daftar rekening resmi Badan Amil Zakat Provinsi Lampung :

No.	Nama Bank	No. Rekening
1	 <p>BANK LAMPUNG Banknya Masyarakat Lampung</p>	380.00.0303109.3
2	 <p>Bank Muamalat</p>	35100 99999
3	 <p>BANK BRI Melayani Dengan Setulus Hati</p>	0357-01-111111-501
4	 <p>mandiri syariah</p>	72525 55557

4. Menjemput zakat atau datang langsung ke kantor BAZNAS Provinsi Lampung

Jemput zakat yakni petugas BAZ mengambil dana zakatnya ke rumah atau tempat aghniya tersebut bekerja dan pada unit pengumpul zakat (UPZ).

5. Mengadakan pembenahan di intern BAZNAS Lampung

Pembenahan diintern yang diwujudkan melalui program kerja untuk mengoptimalkan penghimpunan dana ZIS. Langkah-langkah yang ditempuh BAZNAS antara lain:

A. Meningkatkan sistem pengelolaan BAZNAS provinsi lampung, sehingga BAZNAS dapat meningkatkan pola pelayanannya kepada masyarakat. Hal ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Merumuskan kebijakan dalam pengelolaan BAZNAS Provinsi Lampung tiap tahun, sehingga kendala yang ada dapat diatasi ditahun berikutnya.
- 2) Mengembangkan kajian dan pemahaman hukum perzakatan.
- 3) Membuka ruang konsultasi pengaduan dan mengolah pendapat umat

B. Meningkatkan kualitas pengelolaan BAZNAS Provinsi Lampung, sehingga kualitas pengelolaan BAZNAS meningkat dan menjadikan pelayanan BAZNAS kepada

masyarakat menjadi lebih baik. Hal ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Mengawasi dan memonitor pelaksanaan kegiatan BAZNAS Provinsi Lampung
- 2) Mengadakan kunjungan dan pemantauan kegiatan BAZNAS kabupaten/UPZ.

C. Mengevaluasi program kerja BAZNAS Provinsi Lampung, sehingga kinerja lebih terawasi hingga kinerja BAZNAS meningkat. Hal ini diwujudkan dengan:

- 1) Mencermati dan mengevaluasi program kerja BAZNAS Provinsi Lampung
- 2) Mengevaluasi laporan pertanggungjawaban BAZNAS Provinsi Lampung

D. Meningkatkan operasional pengelolaan BAZNAS Provinsi Lampung, sehingga pengelolaan BAZ menjadi terbentuk. Hal ini dilakukan dengan cara:

- 1) Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan BAZNAS Provinsi Lampung dengan merintis berdirinya kantor BAZNAS Provinsi Lampung dan mengoptimalkan website Baznas Provinsi Lampung.

- 2) Melaksanakan rencana kerja BAZNAS Provinsi Lampung dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan program kerja yang telah dirumuskan.
- 3) Mengadakan rapat pleno.

E. Menyusun laporan kegiatan BAZNAS Provinsi Lampung, sehingga laporan BAZ lebih jelas dan kegiatan BAZ lebih terpantau. Hal ini dilakukan dengan cara:

- 1) Menyusun laporan kinerja kegiatan.
- 2) Menyusun laporan kinerja kegiatan pertanggungjawaban kegiatan BAZNAS Provinsi Lampung.

F. Mengembangkan perencanaan pengelolaan BAZNAS, sehingga pengelolaan BAZ menjadi terencana dan lebih baik. Hal ini dilakukan dengan cara:

- 1) Mengumpulkan data muzaki dan mustahik dari UPZ yang ada di instansi pemerintah untuk selanjutnya mengolahnya menjadi sebuah data yang baik.
- 2) Merumuskan pengembangan dan pengolahan dana BAZNAS Provinsi Lampung
- 3) Mengadakan pembinaan manajemen pengelolaan BAZNAS Provinsi Lampung dengan melibatkan pengelola UPZ instansi

G. Meningkatkan sistem pengelolaan BAZNAS Provinsi Lampung, sehingga pengelolaan BAZ menjadi lebih baik dan pemahaman masyarakat tentang BAZ meningkat. Hal ini dilakukan dengan cara:

- 1) Mensosialisasikan kebijakan dan pedoman pengelolaan BAZNAS kepada UPZ instansi
- 2) Menerbitkan leaflet pedoman dan spanduk BAZ.

H. Meningkatkan dana BAZNAS Provinsi Lampung, sehingga kualitas pengumpulan dana BAZNAS Provinsi Lampung menjadi meningkat. Hal ini dilakukan dengan cara:

- 1) Mengadakan penggalan dana BAZ dan melaporkannya setiap bulan.
- 2) Membentuk UPZ-UPZ di instansi pemerintah, perusahaan swasta, maupun di tengah-tengah masyarakat Provinsi Lampung.

b. Strategi Pendistribusian ZIS

Dalam pengelolaan dana ZIS, dana dari masyarakat Provinsi Lampung yang tidak sedikit jumlahnya, harus mendapatkan perhatian yang serius. Pendistribusiannya harus sesuai dengan peruntukkan dan penggolongan. Misalnya dana zakat harus

dilaporkan secara jelas, prioritas pendistribusiannya pada 8 asnaf atau delapan kelompok penerima zakat.

Dalam rangka pengembangan diri BAZNAS Provinsi Lampung menjadi Badan Amil Zakat yang profesional, dengan tingkat kesadaran muzaki yang tinggi serta tumbuh kembangnya perekonomian warga masyarakat yang berlandaskan syariat Islam, serta untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS Provinsi Lampung sehingga dapat menghasilkan dana zakat yang optimal untuk kesejahteraan masyarakat; dilakukanlah beberapa upaya dalam usaha pendistribusian dana ZIS, yaitu:

1. Melakukan Pendistribusian Setiap Bulan

Ketua BAZNAS Provinsi Lampung ataupun petugas (pegawai) BAZNAS Provinsi Lampung akan melakukan gerilya untuk mensurvei ke lokasi-lokasi dimana dana ZIS akan di salurkan. Hal tersebut dimaksudkan agar bantuan dari dana zakat, infak dan sedekah lebih tepat guna dan tepat sasaran. Berikut data keuangannya :

DOMPET PEDULI UNTUK FAKIR MISKIN
PROGRAM BAZNAS PROPINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE LAMPUNG¹⁴

¹⁴ www.baznaslampung.com 23-5-2016

Bank Lampung

No. Rek. : 380.00.0303109.3

No	Nama	Alamat	Jumlah
1	BAZNA	Bandarlampung	Rp
Total			Rp

Bank Muamalat

No. Rek. : 35100 99999

No	Nama	Alamat	Jumlah
1	BAZNAS	Bandarlampung	Rp 50,000,000
Total			Rp 50,000,000

Bank Rakyat Indonesia

No. Rek. : 0357-01-111111-501

N	Nama	Alamat	Jumlah
1	BAZNAS	Bandarlampung	Rp 25,000,000
Total			Rp 25,000,000
Grand Total			Rp

Bank Syariah Mandiri

No. Rek. : 72525 55557

No	Nama	Alamat	Jumlah
1	BAZNAS	Bandarlampung	Rp
	Mahfud S	Terbanggi, Lamteng	Rp
Total			Rp
Grand Total			Rp

*) Sesuai PP No. 60 Tahun 2010 tentang zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dan dibayarkan melalui Baznas dapat mengurangi penghasilan bruto kena pajak. BAZNAS Propinsi dan Kabupaten/Kota se Lampung mengajak masyarakat untuk meningkatkan Zakat, Infak dan Shodaqoh yang dapat dibayarkan melalui rekening BAZNAS di atas.

2. Melakukan Pendistribusian Masal

Pendistribusian (pentasyarufan) masal ini dilakukan pada waktu atau even-even tertentu terutama dibulan suci ramadhan menjelang idul fitri yang diberikan kepada mustahik.

3. Melakukan Pendistribusian Zakat Produktif

Program ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan harapan para mustahik yang diberdayakan ekonominya, kedepannya dapat menjadi muzaki. Mekanismenya: para petugas BAZNAS akan mencari mustahik yang akan di berikan dana ZIS itu sendiri setelah

diadakan survei dan dinyatakan layak untuk dijalankan, maka dana ZIS dapat disalurkan untuk menjalankan usaha tersebut.

4. Memberikan Beasiswa pendidikan

Beasiswa ini Memberikan bantuan beasiswa studi S-1 dalam bentuk biaya hidup (uang makan dan kost) selama maksimum 4 tahun:

1. Bagi guru honor aktif yang akan melanjutkan studi ke S-1 keguruan
2. Bagi lulusan SMA/MA atau sederajat yang diterima melalui jalur non test (PMPAP) untuk semua program studi di :
 1. Universitas Lampung
 2. IAIN Raden Intan
 3. Perguruan Tinggi Teknokrat
 4. UMITRA
 5. Universitas Muhammadiyah Metro

Syarat utama adalah fakir miskin dan akan dievaluasi langsung oleh tim BAZNAS dan Dewan Pendidikan Propinsi Lampung, dengan bentuk pengumuman sebagai berikut melalui Website BAZNAS Lampung :

PENGUMUMAN¹⁵
 DP/004/I.05/2015
 18/BAZ-LPG/V/2015

DEWAN PENDIDIKAN BEKERJASAMA DENGAN BADAN AMIL
 ZAKAT PROPINSI LAMPUNG

Memberikan bantuan beasiswa studi S-1 dalam bentuk biaya hidup (uang makan dan kost)

selama maksimum 4 tahun:

1. Bagi guru honor aktif yang akan melanjutkan studi ke S-1 keguruan
2. Bagi lulusan SMA/MA atau sederajat yang diterima melalui jalur non test (PMPAP)

untuk semua program studi di :

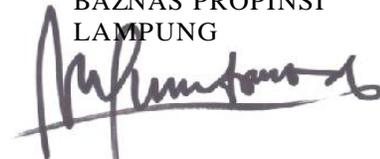
1. Universitas Lampung
2. IAIN Raden Intan
3. Perguruan Tinggi Teknokrat
4. UMITRA
5. Universitas Muhammadiyah Metro

Syarat utama adalah fakir miskin dan akan dievaluasi langsung oleh tim BAZNAS dan

Dewan Pendidikan Propinsi Lampung. Persyaratan khusus agar menghubungi kontak person.

Pendaftaran dan kontak person : Cp. Sri Wahyuni & Rita Linda
 D/a. Kantor Dewan Pendidikan dan BAZNAS Propinsi Lampung
 Komplek BPKB Jl. Cut Mutia No. 23 Teluk Betung Utara
 Bandar Lampung
 Hp. 08977769727 dan 081379799896 (hanya melalui sms)

Bandar Lampung, 27 Mei 2015
 KETUA DEWAN
 PENDIDIKAN dan
 BAZNAS PROPINSI
 LAMPUNG



Ir. Hi. MAHFUD
 SANTOSO, M.M.

Untuk muzakki atau dermawan yang ingin menyalurkan zakat dan sedekah melalui rekening

¹⁵ www.baznaslampung.com 25-7-2016

BAZNAS Propinsi Lampung di :

- Bank Lampung dengan nomor rekening 380.00.0303109.3
- Bank Muamalat nomor rekening 3510099999
- Bank BRI nomor rekenong 0357-01-111111-501
- Bank Syariah Mandiri nomor rekening 7252555557

Total dana awal Rp. 425.000.000,-
Hamba Allah Rp 19.555.000,-

*)Sesuai PP No. 60 Tahun 2010 tentang zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dan dibayarkan melalui Baznas dapat mengurangi penghasilan bruto terkena pajak.

*)Formulir pendaftaran bisa diunduh di website Baznas Lampung :

www.baznaslampung.o

5. Medsitribusikan ZIS untuk program insidental

Kegiatan keagamaan dimasyarakat Provinsi Lampung cukup tinggi. Seringkali warga mengajukan dana ke BAZNAS Provinsi Lampung untuk meminta bantuan dana penyelenggaraan kegiatan keagamaan tersebut. Oleh karena itu, BAZNAS Provinsi Lampung tidak menutup pintu untuk kegiatan dakwah islam. Setelah dilakukan survei mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan, dan dinyatakan layak untuk dijalankan, maka dana ZIS dapat disalurkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

6. Mengadakan pembenahan di intern BAZNAS Provinsi Lampung

Pembenahan yang diwujudkan melalui program kerja untuk mengoptimalkan pendistribusian dana ZIS. Antara lain:

1. Mengembangkan pemberdayaan BAZNAS Provinsi Lampung, sehingga pemberdayaan lebih meningkat dan berkembang. Hal ini dilakukan dengan cara:
 - a. Memberikan pendampingan pelayanan sosial kemanusiaan pada masyarakat dan lembaga.
 - b. Mengembangkan pemberdayaan pendistribusian dana BAZ dengan mengadakan pendampingan pemberdayaan peningkatan ekonomi pada masyarakat.
2. Melaksanakan distribusi dana ZIS Provinsi Lampung, sehingga pendistribusian dana BAZ menjadi lebih baik dan sesuai aturan yang berlaku. Hal ini dilakukan dengan cara:
 - a. Menerima dan menyeleksi calon mustahik
 - b. Mengadakan pendistribusian dana BAZ kepada masyarakat dan lembaga masyarakat.
 - c. Mencatat pendistribusian dana BAZNAS

BAB IV

KEPEMIMPINAN BAZNAS DALAM PENGELOLAAN ZIS

A. Tipe Kepemimpinan Yang Di Terapkan BAZNAS Lampung Terhadap Pengelolaan ZIS

Perubahan lingkungan organisasi yang semakin kompleks dan kompetitif, menuntut setiap organisasi dan perusahaan untuk bersikap lebih responsif agar sanggup bertahan dan terus berkembang.¹ Untuk mendukung perubahan organisasi tersebut, maka diperlukan adanya perubahan individu. Proses menyelaraskan perubahan organisasi dengan perubahan individu ini tidaklah mudah. Pemimpin sebagai panutan dalam organisasi, sehingga perubahan harus dimulai dari tingkat yang paling atas yaitu pemimpin itu sendiri. Maka dari itu, organisasi memerlukan pemimpin yang mampu menjadi motor penggerak yang mendorong perubahan organisasi. Sebagaimana yang di terapkan pimpinan BAZNAS terhadap Karyawan.² Pekerjaan karyawan diberikan dengan tenggang waktu/deadline, Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat lebih diutamakan dibanding keputusan perseorangan, Karyawan di bimbing agar menyelesaikan pekerjaan dengan sebaik baiknya, karyawan di bombing agar sigap dalam mengerjakan satu tugas ke tugas

¹ Werther, W.B. dan Davis, Keith *Human Resources and Personnel Management. Fourth Edition*. Singapore: McGraw-Hill Book Co. (1992), h. 56

² Wawancara dengan pihak baznas (8-7-16)

yang lainnya, karyawan harus paham dan mengerti mengenai pekerjaan yang di lakukannya, Disiplin waktu adalah hal yang utama bagi karyawan, Karyawan dengan mandiri mengerjakan tugas yang ditanggung jawabkan kepadanya, Kerja kelompok/tim lebih diutamakan dalam menyelesaikan pekerjaan.

Sampai saat ini, kepemimpinan masih menjadi topik yang menarik untuk dikaji dan diteleti, karena paling sering diamati namun merupakan fenomena yang sedikit dipahami. Fenomena gaya kepemimpinan di Indonesia menjadi sebuah masalah menarik dan berpengaruh besar dalam kehidupan politik dan bernegara. Dalam dunia bisnis, gaya kepemimpinan berpengaruh kuat terhadap jalannya organisasi dan kelangsungan hidup organisasi.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat dan perekonomian Indonesia yang kurang stabil, hal ini bisa saja menjadi sumber, kendala organisasi namun bisa juga menjadi sumber keuntungan organisasi. Kepemimpinan yang efektif bisa membantu organisasi untuk bisa bertahan dalam situasi ketidakpastian di masa dating.³ Seorang pemimpin yang efektif harus tanggap terhadap perubahan, mampu menganalisis kekuatan dan kelemahan sumber daya manusianya sehingga mampu memaksimalkan kinerja organisasi dan

³ Gibson, J.L., Ivancevich, J.M., dan Donnelly, J.Jr. (*Organisasi dan Manajemen: Perilaku, Struktur, dan Proses*. Edisi Keempat. Jakarta: Penerbit Erlangga. 1984).h.87

memecahkan masalah dengan tepat. Pemimpin yang efektif sanggup mempengaruhi para pengikutnya untuk mempunyai optimisme yang lebih besar, rasa percaya diri, serta komitmen kepada tujuan dan misi organisasi.⁴ Hal ini membawa konsekuensi bahwa setiap pemimpin berkewajiban untuk memberikan perhatian sungguh-sungguh dalam membina, menggerakkan dan mengarahkan seluruh potensi karyawan di lingkungannya agar dapat mewujudkan stabilitas organisasi dan peningkatan produktivitas yang berorientasi pada tujuan organisasi.

Pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang mengakui kekuatan- kekuatan penting yang terkandung dalam individu. Setiap individu memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda-beda, Setiap individu memiliki tingkat keahlian yang berbeda-beda pula.⁵ Pemimpin harus fleksibel dalam pemahaman segala potensi yang dimiliki oleh individu dan berbagai permasalahan yang dihadapi individu tersebut. Dengan melakukan pendekatan tersebut, pemimpin dapat menerapkan segala peraturan dan kebijakan organisasi serta melimpahkan tugas dan tanggung jawab dengan tepat. Hal ini sejalan dengan usaha untuk menumbuhkan komitmen organisasi dari diri karyawan. Sehingga pemimpin nantinya dapat meningkatkan kepuasan karyawan terhadap

⁴ Yukl, A.G. *Kepemimpinan Dalam Organisasi*, Edisi Bahasa Indonesia : (Yusuf Udaaya, Jakarta: Penerbit Prenhallindo1998), h.76

⁵ Heidrajaehcman dan Husnan Suad ("*Manajemen Personalia*", Yogyakarta, BPFE, 2000). h 67

pekerjaannya serta dapat meningkatkan kinerja karyawan dengan lebih efektif.

Pemimpin mempunyai tanggung jawab menciptakan kondisi-kondisi yang merangsang anggota agar dapat mencapai tujuan yang ditentukan. Gaya kepemimpinan menjadi cermin kemampuan seseorang dalam mempengaruhi individu atau kelompok.⁶ sebagaimana Pimpinan BAZNAS Lampung mampu menjaga keselarasan antara pemenuhan kebutuhan individu dengan pengarahan individu pada tujuan organisasi. Pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang mengakui kekuatan- kekuatan penting yang terkandung dalam individu atau kelompok, serta fleksibel dalam cara pendekatan yang digunakan demi meningkatkan kinerja seluruh organisasinya.⁷

Gaya kepemimpinan dalam BAZNAS merupakan hal penting karena dalam menjalankan sebuah organisasi modern yang menghendaki adanya demokratisasi dalam pelaksanaan kerja dan kepemimpinan perusahaan agar mampu mengelola ZIS dengan efektif. Gaya kepemimpinan adalah suatu seni mengerahkan segala sumber daya yang dimiliki dalam upaya mencapai tujuan dengan setrategi yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Akibat yang mungkin timbul

⁶ Rivai, Harif, A.. *Pengaruh Kepuasan Gaji, Kepuasan Kerja, dan Komitmen Organisasional Terhadap Intensi Keluar*. Tesis, Universitas Gajah Mada Yogyakarta. 2001. H.89

⁷ Robbins, S.P. *Perilaku Organisasi, Jilid I, Edisi 9 (Indonesia)*, PT. Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta. 2003. h. 34

dari adanya gaya kepemimpinan yang buruk adalah penurunan kinerja karyawan yang akan membawa dampak kepada penurunan kinerja total perusahaan.

Gaya kepemimpinan pada dasarnya mengandung pengertian sebagai suatu perwujudan tingkah laku dari seorang pemimpin yang menyangkut kemampuannya dalam memimpin.⁸ Perwujudan tersebut biasanya membentuk suatu pola atau bentuk tertentu. Pengertian gaya kepemimpinan yang demikian ini sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Davis dan Newstrom yang menyatakan bahwa pola tindakan pemimpin secara keseluruhan seperti yang dipersepsikan atau diacu oleh bawahan.⁹ Gaya kepemimpinan mewakili filsafat, ketrampilan, dan sikap pemimpin dalam politik. Gaya kepemimpinan adalah pola tingkah laku yang dirancang untuk mengintegrasikan tujuan organisasi dengan tujuan individu untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁰ Sedangkan menurut Tjiptono gaya kepemimpinan adalah suatu cara yang digunakan pemimpin dalam berinteraksi dengan bawahannya.¹¹ hasil dari wawancara dan observasi peneliti menemukan Kepemimpinan BAZNAS Pemimpin menjalin hubungan non formal kepada karyawan, Setiap pengambilan keputusan

⁸⁸ Ibid. h. 78

⁹ Flippo, Edwin B. Masud Moh (alih bahasa),1990.*Manajemen Personalia*. Edisi Keenam. Jilid Kedua.Jakarta : Erlangga. 1990.h 23

¹⁰ Ibid. h.56

¹¹ Ibid. h. 78

karyawan selalu dilibatkan, Pemimpin memberikan tugas yang menantang untuk dikerjakan, Pemimpin meyakinkan karyawan bahwa karyawan mampu menyelesaikan tugas, Ada tuntutan oleh organisasi untuk melakukan inovasi dan pengambilan resiko pada setiap pekerjaan, ketelitian dan kecermatan dalam pekerjaan yang di lakukan, Dalam mengambil keputusan, organisasi selalu mempertimbangkan dampak keputusan tersebut kepada karyawan. Kerja kelompok/tim lebih diutamakan dalam menyelesaikan pekerjaan.¹²

Menurut Alberto kepemimpinan berpengaruh positif kuat terhadap kinerja, juga berpengaruh signifikan terhadap *learning* organisasi.¹³ Temuan ini memberikan indikasi bahwa gaya kepemimpinan seorang pemimpin sangat berpengaruh terhadap kinerja bawahannya, di samping itu untuk mendapatkan kinerja yang baik diperlukan juga adanya pemberian pembelajaran terhadap bawahannya. Begitu juga baznas lampung yang mana pimpinan mengkomunikasikan informasi mengenai tugas, kebijakan kebijakan terkait organisasi, Atasan mengkomunikasikan hasil kinerja ke bawahannya, Karyawan dengan mudah dapat melakukan hubungan

¹² Wawancara dengan Ibu Rita linda selaku petugas harian

¹³ Utomo,K.W “Kecenderungan Kepemimpinan Transaksional dan Transformasional, dan Hubungannya Dengan Organizational Citizenship Behavior, Komitmen Organisasi, dan Kepuasan Kerja”.(*Journal Riset Ekonomi dan Manajemen*. Surabaya. 2002)Vol. 2. No. 2. h. 34- 52.

komunikasi dengan atasan, Setiap kendala pekerjaan yang terjadi karyawan mengkomunikasikan kepada atasan, karyawan percaya terhadap rekan kerjanya dalam mengerjakan pekerjaan, dengan rekan kerja, kordinasi dan kerjasama terhadap pekerjaan dapat dengan mudah terbentuk, Perbedaan divisi dan jabatan tidak menjadi penghalang bagi dalam memperoleh informasi, karyawan mempercayai informasi yang diberikan secara pribadi kepadanya, Pimpinan selalu memberikan penggarahan atas setiap pekerjaan yang diberikan.

Pemimpin haruslah menerapkan gaya kepemimpinan yang tepat sesuai dengan kebutuhan kelompok dan organisasi yang ia pimpin, untuk memastikan tujuan kelompok dan organisasi tercapai sesuai dengan harapan kelompok atau organisasi. Pemimpin yang merupakan ujung tombak dari sebuah organisasi haruslah di isi dengan orang yang tepat pada waktu yang tepat jika tidak maka organisasi akan sulit sekali mencapai tujuan yang telah di tentukan, gaya kepemimpinan yang di terapkan haruslah mendukung perkembangan organisasi dan memacu produktivitas kinerja bawahannya.

Dari data wawancara dan observasi yang peneliti lakukan pimpinan BAZNAS Provinsi Lampung memimpin organisasi BAZNAS bersamaan memipin organisasi-organisasi lain, ketua BAZNAS provinsi Lampung

menjabat sebagai ketua Dewan pendidikan Lampung dan Ketua organisasi-organisasi lain dan aktif dalam 32 organisasi tutur Ibu Rita linda selaku pelaksana harian dan wakil-wakil ketua BAZNAS juga aktif dalam kegiatan di luar BAZNAS sebagaimana bapak Absor wakil ketua 1 yang juga merupakan dosen, waka 2 bapak Burlian adalah juga pengusaha, dan waka 3 bapak Afif merupakan pensiunan pimpinan PT.Gunung Madu, karena kesibukan beliau-beliau maka tidak bisa selalu stay di tempat dan terkadang ketua BAZNAS mendelegasikan tugas kepada bawahan yang lain contoh seperti saat rapat dengan FOZ (Forum Organisasi Zakat) Lampung tentang pengelolaan zakat di Lampung, namun di sela-sela kesibukan ketua BAZNAS lampung mengontrol dan mengamati perkembangan organisasi melalui rapat-rapat yang di adakan kurang lebih 1 sampai 2 kali dalam satu bulan, di dalam rapat ini ketua BAZNAS mendengarkan masukan dari para bawahannya dan memberikan tugas dan arahan-arahan kepada para bawahannya agar para bawahannya mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan maksimal.

Berdasarkan hal ini maka peneliti menyimpulkan gaya Kepemimpinan yang di terapkan oleh ketua BAZNAS Provinsi Lampung adalah tipe demokratis yang Amanah dimana pimpinan berorientasi pada manusia dan memberikan bimbingan kepada

pengikutnya. Tipe ini menekankan pada rasa tanggung jawab dan kerjasama yang baik antara karyawan.

B. Strategi yang di gunakan Ketua BAZNAS Provinsi Lampung dalam pengelolaan ZIS

Zakat merupakan kewajiban yang harus dijalankan setiap muslim. Zakat sendiri berasal dari kata dasar (masdar) *zaka* yang berarti tumbuh, berkah, bersih dan baik. Sesuatu itu *zaka* berarti tumbuh dan berkembang dan seseorang itu *zaka* berarti orang itu baik.¹⁴

Kata *amwal* jamak dari kata *mal* yang dapat diartikan segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk memiliki dan menyimpannya. Pada mulanya kekayaan sepadan dengan emas dan perak, namun berkembang menjadi segala barang yang dimiliki dan disimpan.¹⁵ Sedangkan zakat *mall* secara istilah berarti sebagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.¹⁶ Pada masa Rasulullah dan sahabat, pelaksanaan zakat dilaksanakan dengan cara petugas (*amil*) mengambil zakat dari para muzakki atau muzakki sendiri menyerahkan secara langsung zakatnya kepada Bait al-Mal, lalu oleh para petugasnya didistribusikan kepada para mustahiq yang tergabung dalam asnaf

¹⁴ Ardi Sucipto, “Analisa Distribusi Terhadap Tingkat Pendapatan dan keuntungan Mustahiq (Studi komparasi pada LAZIS Muhammadiyah Warungbroto)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, (Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007)

¹⁵ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung: Rosyda Karya, 2003),h. 89

¹⁶ UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

tsamanyah (delapan golongan yang berhak menerima zakat). Meskipun dalam organisasi yang sederhana namun pengelolaan zakat pada masa itu dinilai berhasil. Hal ini sangat ditentukan oleh faktor manusiannya (SDM), karena amil pada waktu itu adalah orang yang jujur, amanah, transparan, dan akuntabel. Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Salim bin Abdullah bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah telah memberikannya zakat, lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi. Salim pun mengelolanya sampai ia mampu memberikan sedekah dari usaha tersebut.¹⁷ Dengan demikian, petugas memiliki peran sangat penting dalam pengumpulan zakat. Petugas adalah orang-orang pilihan yang memiliki sifat jujur, amanah, akuntabel atau terpercaya dan harus memiliki pemahaman yang baik tentang zakat.

Secara umum, tujuan zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu harta si kaya untuk dialokasikan kepada si miskin. Menurut Yusuf al-Qaradhawi, tujuan zakat adalah:¹⁸

1. Zakat mensucikan jiwa dari sifat kikir
2. Zakat mendidik berinfak dan memberi
3. Berakhlak dengan Allah

¹⁷ Ardi sucipto. *Op-cit* h.78

¹⁸ Ardi sucipto. *op-cit.*, h. 67

4. Zakat merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah
5. Zakat mengobati dari cinta dunia
6. Zakat mengembangkan kekayaan batin
7. Zakat mensucikan harta
8. Zakat mengembangkan harta

Zakat merupakan tanggung jawab sosial, dimana aturan jaminan sosial ini tidak dikenal di Barat, kecuali dalam ruang lingkup yang sempit, yaitu jaminan pekerjaan dengan menolong kelompok orang yang lemah dan fakir. Fungsi zakat lainnya adalah menghapus kemiskinan pada masyarakat. Karena adanya pendistribusian dana zakat. Zakat juga mencegah penumpukan kekayaan di tangan sebagian kecil manusia. Zakat memiliki sasaran dan dampak dalam menegakkan akhlak yang mulia.¹⁹ Untuk memudahkan analisis maka pengelolaan ZIS di BAZNAS Provinsi Lampung di uraikan sebagai berikut:

1. Strategi Penghimpunan ZIS BAZNAS Provinsi Lampung

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

¹⁹ *Ibid.*, h. 877.

Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas

Islam memiliki pandangan terhadap harta berdasarkan fakta atau kenyataan. Di satu sisi harta merupakan urat nadi kehidupan dan tiang tengah organisasi perorangan dan masyarakat.²⁰ Sendi-sendi Islam tersusun dan ditegakkan atas lima dasar, yang salah satunya adalah menunaikan zakat. Di samping itu, zakat juga merupakan ibadah yang bertalian dengan harta dimana agama Islam menuntut supaya umatnya yang mampu menolong yang miskin. Zakat adalah ibadah. Keberadaan zakat dalam rukun Islam adalah sebagai rukun ibadah.

Zakat penghasilan atau zakat profesi adalah suatu istilah yang muncul dewasa ini. Adapun istilah ulama' salaf bagi zakat atas penghasilan atau profesi biasanya disebut dengan *al-mal al-mustafad*²¹. yang termasuk dalam kategori zakat *al-mal al-mustafad* adalah pendapatan yang dihasilkan dari profesi non-zakat yang dijalani seperti gaji pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, dan lain-

²⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid ke-2, penerjemah Noer Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), h. 4.

²¹Fakhruddin. *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h133.

lain. Orang-orang yang memiliki profesi itu memperoleh dan menerima pendapatan mereka tidak teratur, kadang-kadang setiap hari seperti pendapatan seorang dokter, kadang-kadang waktu tertentu seperti advokat dan kontraktor serta penjahit atau sebangsanya, sebagian pekerja menerima upah mereka setiap minggu atau dua minggu, dan kebanyakan pegawai menerima gaji mereka setiap bulan, lalu bagaimana menentukan penghasilan mereka itu.²²Guru-guru seperti Abdur Rahman Hasan Muhammad Abu Zahrah dan Abdul Wahab Khalaf telah mengemukakan persoalan ini dalam ceramahnya tentang zakat di Damaskus pada tahun 1952, menurut mereka pencarian dan profesi dapat diambil zakatnya bila sudah setahun dan cukup nisab. Ceramah mereka tersebut sampai pada suatu kesimpulan yang teksnya sebagai berikut: "Penghasilan dan profesi dapat diambil zakatnya bila sudah setahun dan cukup nisab. Jika berpegang kepada pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad bahwa nisab tidak perlu harus tercapai sepanjang tahun, tapi cukup tercapai penuh antara dua ujung tahun tanpa kurang di tengah-tengah dapat menyimpulkan bahwa dengan penafsiran tersebut memungkinkan untuk mewajibkan zakat atas hasil penghasilan setiap tahun, karena hasil itu jarang terhenti sepanjang tahun

²² Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat*, cet. ke- 11; (Jakarta: Mitra Kerjaya Indonesia,2010), h. 482

bahkan kebanyakan mencapai kedua sisi ujung tahun tersebut.²³ Berdasar hal itu, dapat menetapkan hasil penghasilan sebagai sumber zakat, karena terdapatnya *illat* (penyebab), yang menurut ulama-ulama fikih sah, dan nisab, yang merupakan landasan wajib zakat." "Dan karena Islam mempunyai ukuran bagi seseorang – untuk bisa dianggap kaya-yaitu Junaih emas menurut ukuran Junaih Mesir lama maka ukuran itu harus terpenuhi pula buat seseorang untuk terkena kewajiban zakat, sehingga jelas perbedaan antara orang kaya yang wajib zakat dan orang miskin penerima zakat. Dalam hal ini, mazhab Hanafi lebih jelas, yaitu bahwa jumlah nisab itu cukup terdapat pada awal dan akhir tahun saja tanpa harus terdapat di pertengahan tahun. Ketentuan itu harus diperhatikan dalam mewajibkan zakat atas hasil penghasilan dan profesi ini, supaya dapat jelas siapa yang tergolong kaya dan siapa yang tergolong miskin, seorang pekerja profesi jarang tidak memenuhi ketentuan tersebut." Mengenai besar zakat, mereka mengatakan, "Penghasilan dan profesi, tidak menemukan contohnya dalam fikih, selain masalah khusus mengenai penyewaan yang dibicarakan Ahmad. Ia dilaporkan berpendapat tentang seseorang yang menyewakan rumahnya dan mendapatkan uang sewaan yang cukup nisab, bahwa orang tersebut

²³ *Ibid.*, h. 460

wajib mengeluarkan zakatnya ketika menerimanya tanpa persyaratan setahun.²⁴

Hal itu pada hakikatnya menyerupai mata penghasilan, dan wajib dikeluarkan zakatnya bila sudah mencapai satu nis}ab. Hal itu sesuai dengan apa yang telah ditegaskan lebih dahulu, bahwa jarang seseorang pekerja yang penghasilannya tidak mencapai nisab seperti yang telah ditetapkan, meskipun tidak cukup di pertengahan tahun tetapi cukup pada akhir tahun. Ia wajib mengeluarkan zakat sesuai dengan nisab yang telah berumur setahun.²⁵Di samping itu, juga berdasarkan pada tujuan yang disyari'atkannya zakat, seperti untuk membersihkan dan mengembangkan harta serta menolong para mustahiq, zakat profesi juga mencerminkan rasa keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam.

Dalam menentukan tradisi nishab, kadar dan waktu mengeluarkan zakat profesi, hal ini sangat tergantung kepada *qiyas* yang dilakukan. Pertama jika dianalogikan pada zakat perdagangan, maka nishab, kadar, dan waktu pengeluarannya sama dengannya dan sama pula dengan zakat emas dan perak. Nishabnya senilai 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5% dan waktu

²⁴ *Ibid.*, h. 460.

²⁵ *Ibid.*, h. 461

mengeluarkannya setahun sekali, setelah dikurangi kebutuhan pokok.²⁶

Zakat yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat dalam hal ini Bazda, harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Zakat tersebut harus disalurkan kepada para mustahik sebagaimana tergambar dalam surah at- Taubah ayat 60 antara lain sebagai berikut: pertama fakir dan miskin, kedua kelompok amil (petugas zakat), ketiga kelompok muallaf, keempat dalam memerdekakan budak belian, kelima kelompok gharimin, keenam dalam jalan Allah (fi sabilillah) dan ketujuh ibnu sabil.

Untuk memaksimalkan penghimpunan dana ZIS, baznas lampung melakukan upaya, antara lain :

1. Mensosialisasikan gerakan sadar zakat, infak, sedekah, dan yang sejenisnya pada kelompok masyarakat muslim terutama instansi pemerintahan provinsi Lampung. Cara ini dilakukan melalui berbagai media; misalnya saja ketika ada acara di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang melibatkan muzaki potensial, maka BAZNAS yang akan mensosialisasikan gerakan sadar zakat, infak dan sedekah

²⁶ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h, 96.

sejenisnya pada para muzaki potensial tersebut. Selain itu, sosialisasi gerakan sadar zakat, infak dan sedekah, juga dilakukan melalui media majelis taklim yang banyak terdapat di masyarakat Lampung. Harapannya, masyarakat Lampung menjadi tergugah untuk bersama-sama menunaikan kewajibannya berzakat melalui wadah/tempat yang telah disediakan oleh pemerintah. Sehingga dengan demikian, dana yang terkumpul menjadi lebih besar dibandingkan jika muzaki berzakat secara individu. Dengan sokongan dana zakat yang besar, maka dapat diperoleh hasil (manfaat dari zakat tersebut) yang besar pula.

2. Membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Mengingat banyaknya instansi pemerintahan di Provinsi Lampung maka dibentuklah unit pengumpulan zakat di kantor instansi pemerintah. Pegawai negeri sipil dan swasta ini merupakan muzaki potensial, oleh karena itu disetiap instansi pemerintah dan swasta yang ada di Lampung mulailah didirikan unit pengumpul zakat untuk memudahkan muzaki dalam menyerahkan dana ZISnya.

3. Menyediakan Transfer zakat Melalui Rekening

Dari nomer rekening yang disediakan terdapat beberapa muzaki yang menyetokan zakat, infak maupun sedekahnya melalui rekening kepada BAZNAS Provinsi Lampung

4. Menjemput zakat atau datang langsung ke kantor BAZNAS

Provinsi Lampung. Jemput zakat yakni petugas BAZ mengambil dana zakatnya ke rumah atau tempat aghniya tersebut bekerja dan pada unit pengumpul zakat (UPZ).

5. Mengadakan pembenahan di intern BAZNAS Lampung

Pembenahan diintern yang diwujudkan melalui program kerja untuk mengoptimalkan penghimpunan dana ZIS. Langkah-langkah yang ditempuh BAZNAS antara lain:

A. Meningkatkan sistem pengelolaan BAZNAS provinsi lampung, sehingga BAZNAS dapat meningkatkan pola pelayanannya kepada masyarakat. Hal ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan dalam pengelolaan BAZNAS Provinsi Lampung tiap tahun, sehingga kendala yang ada dapat diatasi ditahun berikutnya.
2. Mengembangkan kajian dan pemahaman hukum perzakatan.

3. Membuka ruang konsultasi pengaduan dan mengolah pendapat umat
- B. Meningkatkan kualitas pengelolaan BAZNAS Provinsi Lampung, sehingga kualitas pengelolaan BAZNAS meningkat dan menjadikan pelayanan BAZNAS kepada masyarakat menjadi lebih baik. Hal ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1. Mengawasi dan memonitor pelaksanaan kegiatan BAZNAS Provinsi Lampung
 2. Mengadakan kunjungan dan pemantauan kegiatan BAZNAS kabupaten/UPZ.
- C. Mengevaluasi program kerja BAZNAS Provinsi Lampung, sehingga kinerja lebih terawasi hingga kinerja BAZNAS meningkat. Hal ini diwujudkan dengan:
1. Mencermati dan mengevaluasi program kerja BAZNAS Provinsi Lampung
 2. Mengevaluasi laporan pertanggungjawaban BAZNAS Provinsi Lampung
- D. Meningkatkan operasional pengelolaan BAZNAS Provinsi Lampung, sehingga pengelolaan BAZ menjadi terbentuk. Hal ini dilakukan dengan cara:

1. Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan BAZNAS Provinsi Lampung dengan merintis berdirinya kantor BAZNAS Provinsi Lampung dan mengoptimalkan website Baznas Provinsi Lampung.
 2. Melaksanakan rencana kerja BAZNAS Provinsi Lampung dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan program kerja yang telah dirumuskan.
 3. Mengadakan rapat pleno.
- E. Menyusun laporan kegiatan BAZNAS Provinsi Lampung, sehingga laporan BAZ lebih jelas dan kegiatan BAZ lebih terpantau. Hal ini dilakukan dengan cara:
1. Menyusun laporan kinerja kegiatan.
 2. Menyusun laporan kinerja kegiatan pertanggungjawaban kegiatan BAZNAS Provinsi Lampung.
- F. Mengembangkan perencanaan pengelolaan BAZNAS, sehingga pengelolaan BAZ menjadi terencana dan lebih baik. Hal ini dilakukan dengan cara:
1. Mengumpulkan data muzaki dan mustahik dari UPZ yang ada di instansi pemerintah untuk selanjutnya mengolahnya menjadi sebuah data yang baik.

2. Merumuskan pengembangan dan pengolahan dana BAZNAS Provinsi Lampung
 3. Mengadakan pembinaan manajemen pengelolaan BAZNAS Provinsi Lampung dengan melibatkan pengelola UPZ instansi
- G. Meningkatkan sistem pengelolaan BAZNAS Provinsi Lampung, sehingga pengelolaan BAZ menjadi lebih baik dan pemahaman masyarakat tentang BAZ meningkat. Hal ini dilakukan dengan cara:
1. Mensosialisasikan kebijakan dan pedoman pengelolaan BAZNAS kepada UPZ instansi
 2. Menerbitkan leaflet pedoman dan spanduk BAZ.
- H. Meningkatkan dana BAZNAS Provinsi Lampung, sehingga kualitas pengumpulan dana BAZNAS Provinsi Lampung menjadi meningkat. Hal ini dilakukan dengan cara:
1. Mengadakan penggalan dana BAZ dan melaporkannya setiap bulan.
 2. Membentuk UPZ-UPZ di instansi pemerintah, perusahaan swasta, maupun di tengah-tengah masyarakat Provinsi Lampung.

Sedangkan hukum Islam memerintahkan agar ‘amil memungut zakat untuk mensucikan harta benda muzaki. Oleh karena itu

BAZNAS Provinsi Lampung melalui UPZ yang telah dibentuknya mengharuskan memungut zakat dari para muzaki. Dari strategi penghimpunan dana ZIS yang dilaksanakan, terlihat kekuatan yang sangat besar apabila hal itu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Dengan adanya UPZ yang dibentuk, maka penghimpunan zakat menjadi semakin mudah. Data yang diperoleh di Badan Amil Zakat provinsi Lampung dapat dianalisis bahwa konsep strategi penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Lampung telah sesuai dengan Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu BAZNAS Provinsi Lampung melalui UPZ yang telah dibentuk sudah mampu mengumpulkan dana ZIS dari para muzaki yang ada di UPZ masing-masing. Standar pengelolaan ZIS di BAZNAS Provinsi Lampung sebagai berikut :

Setiap awal tahun BAZNAS Provinsi Lampung menetapkan target pengumpulan ZIS dan strategi prioritas pendayagunaannya, Berdasarkan target dan strategi tersebut, BAZNAS Provinsi Lampung menyusun rencana dan program kerja, termasuk cara-cara yang harus ditempuh dalam pelaksanaannya, Unit-unit operasional (BAZ tingkat Pemerintah Kotamadya, Kabupaten) melaksanakan rencana dan program kerja yang telah ditetapkan. Dengan diberikan kebebasan bertindak dalam pengembangan teknis operasional pengumpulan ZIS sepanjang tidak bertentangan dengan

ketentuan hukum dan kebijaksanaan atasan. BAZNAS Provinsi Lampung menerima, memonitor dan memberikan bimbingan yang diperlukan. Kemudian menyimpan hasil pengumpulan ZIS di Bank dan melaporkan penyimpanan tersebut kepada BAZNAS pusat Dalam rangka pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS yang terkumpul, BAZNAS provinsi Lampung langsung terjun ke lapangan untuk mencari mustahik yang berhak menerima ZIS Merumuskan strategi kebijaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS untuk tahun yang bersangkutan, untuk diusulkan kepada Kepala Daerah guna memperoleh penetapan lebih lanjut, Berdasarkan ketetapan kebijaksanaan Kepala Daerah tersebut, Ketua BAZNAS Provinsi Lampung menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan tentang alokasi dan rincian pendayagunaan hasil pengumpulan ZIS serta menyalurkan secara bertahap kepada yang berhak menerimanya, BAZNAS Provinsi Lampung menyalurkan kepada mustahik, Mengadakan evaluasi terhadap segala kegiatan yang telah dilakukan pada tahun itu dan merumuskan program dan rencana kerja untuk tahun berikutnya berdasarkan kebijaksanaan (target dan strategi) pendayagunaan yang telah ditetapkan.

Namun belum semua instansi mempunyai UPZ, terbukti pada bulan juni 2016 instansi yang belum mempunyai UPZ, Sebagaimana kita ketahui syarat wajib zakat salah satunya yaitu

mencapai nisab, apabila harta tersebut belum mencapai nisab maka harta tersebut belum wajib dizakati, namun harta tersebut boleh disedekahkan maupun diinfakkan.

Dari strategi yang sudah berjalan khusus untuk strategi jemput zakat ini perlu lebih dikembangkan karena strategi jemput zakat ini sangat berpotensi untuk meningkatkan pengumpulan dana ZIS. Selama ini BAZNAS masih pasif menunggu dana zakat yang di setor oleh para UPZ kepada BAZNAS Provinsi Lampung, Untuk muzaki di luar PNS juga harus dijalin hubungan yang baik dengan BAZNAS Provinsi Lampung, selain mengenalkan BAZNAS provinsi Lampung juga mempercayakan dana ZIS nya pada BAZNAS Provinsi Lampung.

Untuk meyakinkan muzaki tersebut perlu diterapkan strategi sebagai berikut:

- a. Mengupdate dan mensosialisasikan website BAZNAS provinsi Lampung pada masyarakat
- b. Amil mencari dan mendata muzaki
- c. Mendatangi rumah muzaki
- d. Mengenalkan dan mensosialisasikan strategi Provinsi Lampung

- e. Memberikan informasi mengenai kinerja BAZNAS Provinsi Lampung
- f. Memberikan informasi kemana arah pendistribusian dana ZIS
- g. Di ikut sertakan dalam pendistribusian dana ZIS
- h. Memberikan laporan keuangan ZIS

Dari strategi di atas hubungan muzaki di luar PNS terhadap BAZNAS provinsi Lampung akan terjalin lebih harmonis, karena muzaki tahu kemana dananya ZISnya didistribusikan. Dengan demikian kepercayaan muzaki terhadap BAZ akan lebih meningkat.

2. Analisis Strategi Pendistribusian ZIS di BAZNAS Provinsi Lampung

Distribusi berasal dari bahasa Inggris yang berarti pembagian atau penyaluran. Secara terminologi, distribusi adalah penyaluran atau pembagian kepada orang banyak atau beberapa tempat. Pengertian lain mendefinisikan distribusi sebagai penyaluran barang keperluan sehari-hari oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk dan sebagainya.²⁷

Distribusi adalah proses penyaluran barang dari produsen kepada konsumen. Produsen berarti orang yang melakukan proses produksi. Sedangkan konsumen adalah orang yang memakai hasil dari produksi baik barang atau jasa. Sedangkan orang yang melakukan penyaluran

²⁷ W.H.S. Poerwadaminta, Kamus *Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta:Balai Pustaka, 1991) cet. Ke-7, h. 269

disebut distributor. Selain itu, distribusi sebagai kegiatan ekonomi yang menjembatani suatu produksi dan konsumsi agar barang atau jasa sampai tepat kepada konsumen sehingga kegunaan barang atau jasa tersebut akan maksimal.

Menurut Philip Kotler dalam bukunya *Menejemen Pemasaran* distribusi adalah serangkaian organisasi yang saling bergantung yang terlibat dalam proses untuk menjadikan produk atau jasa yang siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Dalam hal ini distribusi dapat diartikan sebagai kegiatan (membagikan atau mengirim) kepada orang atau beberapa tempat.²⁸ Pendistribusian zakat adalah suatu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima pihak muzakki kepada pihak mustahiq sehingga mencapai tujuan organisasi secara efektif. Sistem pendistribusian zakat dari masa ke masa mengalami perubahan. Semula lebih banyak disalurkan untuk kegiatan konsumtif, tetapi belakangan ini lebih banyak pemanfaatan dana zakat disalurkan untuk kegiatan produktif.

Dalam rangka pengembangan diri BAZNAS Provinsi Lampung menjadi Badan Amil Zakat yang profesional, dengan tingkat kesadaran muzaki yang tinggi serta tumbuh kembangnya perekonomian warga masyarakat yang berlandaskan syariat Islam,

²⁸ DepDikBud, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta:Balai Pustaka,1990) cet ke-3, h.308.

serta untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS Provinsi Lampung sehingga dapat menghasilkan dana zakat yang optimal untuk kesejahteraan masyarakat; dilakukanlah beberapa upaya dalam usaha pendistribusian dana ZIS, yaitu:

1. Melakukan Pendistribusian Setiap Bulan

Ketua BAZNAS Provinsi Lampung ataupun petugas (pegawai) BAZNAS Provinsi Lampung akan melakukan gerilya untuk mensurvei ke lokasi-lokasi dimana dana ZIS akan di salurkan. Hal tersebut dimaksudkan agar bantuan dari dana zakat, infak dan sedekah lebih tepat guna dan tepat sasaran.

2. Melakukan Pendistribusian Masal

Pendistribusian (pentasyarufan) masal ini dilakukan pada waktu atau even-even tertentu terutama dibulan suci ramadhan menjelang idul fitri yang diberikan kepada mustahik.

9. Melakukan Pendistribusian Zakat Produktif

Program ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan harapan para mustahik yang diberdayakan ekonominya, kedepannya dapat menjadi muzaki. Mekanismenya: para petugas BAZNAS akan mencari

mustahik yang akan di berikan dana ZIS itu sendiri setelah diadakan survei dan dinyatakan layak untuk dijalankan, maka dana ZIS dapat disalurkan untuk menjalankan usaha tersebut.

10. Memberikan Beasiswa pendidikan

Beasiswa ini Memberikan bantuan beasiswa studi S-1 dalam bentuk biaya hidup (uang makan dan kost) selama maksimum 4 tahun:

1. Bagi guru honor aktif yang akan melanjutkan studi ke S-1 keguruan
2. Bagi lulusan SMA/MA atau sederajat yang diterima melalui jalur non test (PMPAP) untuk semua program studi di :
 1. Universitas Lampung
 2. IAIN Raden Intan
 3. Perguruan Tinggi Teknokrat
 4. UMITRA
 5. Universitas Muhammadiyah Metro

Syarat utama adalah fakir miskin dan akan dievaluasi langsung oleh tim BAZNAS dan Dewan Pendidikan Propinsi Lampung

11. Medsitribusikan ZIS untuk program insidental

Kegiatan keagamaan dimasyarakat Provinsi Lampung cukup tinggi. Seringkali warga mengajukan dana ke BAZNAS Provinsi Lampung untuk meminta bantuan dana penyelenggaraan kegiatan keagamaan tersebut. Oleh karena itu, BAZNAS Provinsi Lampung tidak menutup pintu untuk kegiatan dakwah islam. Setelah dilakukan survei mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan, dan dinyatakan layak untuk dijalankan, maka dana ZIS dapat disalurkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

12. Mengadakan pembenahan di intern BAZNAS Provinsi Lampung

Pembenahan yang diwujudkan melalui program kerja untuk mengoptimalkan pendistribusian dana ZIS. Antara lain:

1. Mengembangkan pemberdayaan BAZNAS Provinsi Lampung, sehingga pemberdayaan lebih meningkat dan berkembang.

Hal ini dilakukan dengan cara:

- c. Memberikan pendampingan pelayanan sosial kemanusiaan pada masyarakat dan lembaga.
- d. Mengembangkan pemberdayaan pendistribusian dana BAZ dengan mengadakan pendampingan pemberdayaan peningkatan ekonomi pada masyarakat.

2. Melaksanakan distribusi dana ZIS Provinsi Lampung, sehingga pendistribusian dana BAZ menjadi lebih baik dan sesuai aturan yang berlaku. Hal ini dilakukan dengan cara:
 - a. Menerima dan menyeleksi calon mustahik
 - b. Mengadakan pendistribusian dana BAZ kepada masyarakat dan lembaga masyarakat.
 - c. Mencatat pendistribusian dana BAZNAS

Zakat produktif merupakan terobosan baru. Zakat yang sebelumnya diberikan dan hanya dikelola secara konsumtif akan dikelola menjadi zakat produktif yang notabeneanya lebih berguna. Apalagi jika dikaitkan dengan kegiatan ekonomi yang terus berkembang dari waktu ke waktu.¹ Secara umum, produktif berarti “banyak menghasilkan karya atau barang”. Produksi juga berarti “banyak menghasilkan, memberi banyak hasil”. Pengertian produksi sendiri di sini menjadi kata sifat yang dalam hal ini kata yang disifati adalah kata zakat, sehingga menjadi zakat produktif yang artinya zakat dimana dalam pendistribusiannya bersifat produktif, lawan konsumtif.² Salah satu syarat keberhasilan zakat adalah dengan pendistribusian Zakat secara professional yang didasarkan kepada landasan yang sehat, sehingga zakat tidak salah sasaran. Menurut Yusuf al-Qaradhawi dalam bukunya *Manajemen Zakat Professional* ada beberapa cara untuk mendistribusikan dana zakat secara professional, yaitu:³

- a. Pola Pendistribusian Produktif yaitu pola pendistribusian dana zakat kepada mustahiq yang ada dipinjamkan oleh amil untuk kepentingan aktifitas suatu usaha atau bisnis.

¹ Didin Hafiduddin, *op-cit.* h. 2.

² Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 63.

³ Mukhlisin, “Pendistribusian dana Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kab. Karawang”, Skripsi tidak diterbitkan, (Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009)

- b. Pendistribusian secara lokal yaitu bahwa para mustahiq di masing-masing wilayah lebih diprioritaskan daripada di wilayah lain, sebagaimana yang kita kenal sebagai otonomi daerah.
- c. Pendistribusian yang adil terhadap semua golongan yaitu adil terhadap semua golongan yang telah dijanjikan sebagai mustahiq oleh Allah dan Rasul-Nya dan adil di antara semua individu dalam satu golongan mustahiq. Artinya keadilan yang memperhatikan dan mempertimbangkan hak, besarnya kebutuhan dan kemaslahatan Islam yang tertinggi.

Pendistribusian dana zakat memiliki fungsi mengecilkan jurang perbedaan antara kaya dan miskin karena bagian harta kekayaan si kaya membantu dan menumbuhkan kehidupan ekonomi yang miskin, sehingga keadaan si miskin dapat diperbaiki.⁴ Sedangkan menurut Syauqi Ismail Syahhatih dalam bukunya *al-Zakat*, zakat berfungsi sebagai sarana jaminan sosial dan persatuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu, dan memberantas kemiskinan umat manusia. Dalam hal ini zakat merupakan bukti kepedulian sosial dan kesetiakawanan nasionalis.⁵ Dalam Al-Qur'an

⁴ Rahman Ritonga dan Zainuddin, *Fiqh Ibadah* (Jakarta:Gaya Media Pratama,1997), h. 200-201.

⁵ Syauqi Ismail Syahhatih, *Prinsip Zakat dalam Dunia Modern*, alih bahasa Ansari Uma (Jakarta: Pustaka dian) h. 9.

sudah dijelaskan secara rinci. Dalam surat At-Taubah ayat 60, Allah menjelaskan tentang para penerima zakat:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا

وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَامِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ

وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana(At-taubah:60)

Dari seluruh penduduk lampung terdapat 14,8 % yang masuk dalam kategori miskin . Data tersebut di ungkapkan oleh ketua BAZNAS Provinsi Lampung, saat halal bihalal dan silaturahmi bersama tokoh agama, Tokoh adat, tokoh masyarakat dan

cendekiawan bersama kapolda di training center PT. GGPC.⁶ Dari sinilah tugas penting amil zakat dalam pendistribusian dana ZIS. Dengan dana yang ada sebaik mungkin harus bisa didistribusikan secara merata.

Program pendistribusian dana ZIS di BAZNAS Provinsi Lampung telah berjalan dengan baik. Dengan dana yang terhimpun BAZNAS Provinsi Lampung mampu menunjukkan kekecisannya dalam mengelola dana ZIS yang terkumpul. Dalam pendistribusian pun BAZNAS Provinsi Lampung merumuskan suatu cara agar kedepannya dana ZIS yang dapat dihimpun menjadi lebih maksimal.

Untuk mewujudkan harapan masyarakat fakir dan miskin yang akan mendirikan sebuah usaha, BAZNAS provinsi Lampung berusaha membantu dan mendampingi kegiatan usaha tersebut melalui program zakat produktif. Dengan usaha yang dilakukannya sendiri sedangkan modalnya melalui dana ZIS dari BAZNAS Provinsi Lampung. Selain itu untuk membantu dakwah Islam, BAZNAS provinsi Lampung juga berusaha untuk lebih teliti dalam menyalurkan zakat para muzaki dengan terjun langsung ke masyarakat mencari dan meneliti para mustahik yang memang benar-benar berhak mendapatkan ZIS dari para muzaki yang

⁶ Baznas lampung. Org 7-17-2016

telah di amanahkan, dan menolak proposal-proposal permintaan dana untuk menghindari tidak tepatnya ZIS yang di salurkan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dari hasil penelitian yang di dapati peneliti dari teori dan hasil penelitian lapangan, dapat di tarik kesimpulan bahwa gaya kepemimpinan yang di terapkan Pimpinan BAZNAS Provinsi Lampung adalah gaya kepemimpinan demokratis yang amanah yakni bersedia memikul tanggungjawab dengan aman dan tanpa keraguan, dan dimana ketua berorientasi pada manusia dan memberikan bimbingan kepada pengikutnya. Tipe ini menekankan pada rasa tanggung jawab dan kerjasama yang baik antara karyawan.
2. Dalam strategi pengelolaan dana ZIS untuk penghimpunan BASNAS Provinsi Lampung menggunakan strategi aksi jemput zakat yang ada pada masing- masing Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan juga menyediakan nomor rekening agar para muzaki bisa langsung mentransfernya langsung ke rekening BAZNAS Provinsi Lampung. Selain itu juga menerapkan para muzaki untuk datang langsung ke kantor BAZNAS Provinsi Lampung. Dari segi pendistribusian dana ZIS BAZNAS Provinsi Lampung menerapkan dua bentuk pendistribusian yaitu zakat produktif dan zakat konsumtif. Zakat

produktif yaitu pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus. Sedangkan zakat konsumtif yaitu zakat yang diberikan hanya untuk memenuhi keperluan sehari-hari.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan di atas, maka diajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. BAZNAS Provinsi Lampung diharapkan dapat memacu unit-unit pengelola zakat yang telah dibentuk dan membentuk segera unit pengelola zakat (UPZ) pada instansi-isntansi yang belum terdapat UPZ, agar mampu menghimpun dana ZIS se maksimal mungkin.
2. BAZNAS Provinsi Lampung diharapkan mampu mengintensifkan program zakat produktif, sehingga dengan demikian para mustahik mempunyai kemungkinan akan terangkat kehidupan ekonominya; dari mustahik menjadi muzaki.
3. Dalam memberikan zakat produktif yang digunakan sebagai modal usaha kecil kepada para mustahik, hendaknya BAZNAS Provinsi Lampung mempunyai pegawai khusus dalam keahlian usaha kecil dan menengah dan juga dalam bidang peternakan, sehingga mampu memberikan pengawasan dan bimbingan yang

lebih baik dan nantinya dana yang sudah disalurkan benar-benar menjadi dana yang digunakan untuk keperluan produktif dan mampu menurunkan tingkat kemiskinan yang ada

4. Strategi jemput zakat ini perlu ditingkatkan fungsinya terhadap muzaki diluar muzaki PNS di Pemerintahan Provinsi Lampung
5. Strategi yang menggunakan website/internet ini perlu disosialisasikan lebih mendalam kepada para muzaki maupun mustahik. Agar strategi ini lebih tepat sasaran dan tidak sia-sia begitu saja